



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang perdagangan dan industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKJ).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perdagin dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Disdagperin. Selain untuk memenuhi prinsip



akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP, meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja. Pengukuran sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan LKIP Disdagperind. Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 adalah perwujudan kewajiban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah untuk mempertanggung-jawabkan kinerja yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah di tahun yang akan datang.

1.2. TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Disdagperin. Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1) Tugas

Tugas Pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang Perdagangan dan Perindustrian serta tugas dekonsentrasi yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, maka fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan
- b. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kreatif, industri agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika dan aneka
- c. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri
- d. Pembinaan dan koordinasi pengujian mutu barang
- e. Pembinaan dan koordinasi industri makanan, minuman dan kemasan
- f. Pembinaan dan koordinasi pasar rakyat dan pasar modern
- g. Pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan tertib niaga
- h. Pembinaan dan pengendalian izin industri dan perdagangan
- i. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri
- j. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unsur organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, struktur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :



a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

b) Bidang Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta aset perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Bidang Sekretariat membawahi Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c) Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri daerah dan sumber daya industri, penyebaran dan pemerataan industri serta kebijakan industri daerah dalam melaksanakan pemberdayaan, pembinaan perizinan, promosi industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, penumbuhan wirausaha, pengembangan industri dan fasilitasi industri. Bidang Industri membawahi Seksi Industri Kreatif, Seksi Industri Agro dan Kimia, Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka.

d) Bidang Perlindungan Konsumen

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, pemberian pembinaan teknis dan pengawasan terhadap barang beredar dan tertib niaga. Bidang Perlindungan Konsumen membawahi Seksi Pemberdayaan Konsumen; Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Tertib Niaga dan Seksi Standardisasi dan pengendalian Mutu Barang.



e) Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana prasana distribusi perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis usaha Perdagangan Dalam Negeri. Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi Seksi Barang Pokok, barang Penting dan Distribusi; Seksi Sarana, Prasarana Distribusi dan Logistik; Seksi Bina Usaha, Pemasaran dan Promosi Produk Dalam Negeri.

f) Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas bimbingan teknis pembinaan ekspor, pengembangan dan pemantauan komoditi ekspor, evaluasi kegiatan ekspor impor, penyediaan dan penyebaran informasi perdagangan internasional, promosi dagang serta pembinaan perizinan dan non perizinan di bidang ekspor impor.

Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi Seksi Ekspor dan Impor; Seksi Pengembangan dan Promosi Komoditi Ekspor dan Seksi Fasilitasi dan Kerjasama

g) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Palangka Raya

Tugas Pokok Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Palangka Raya adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

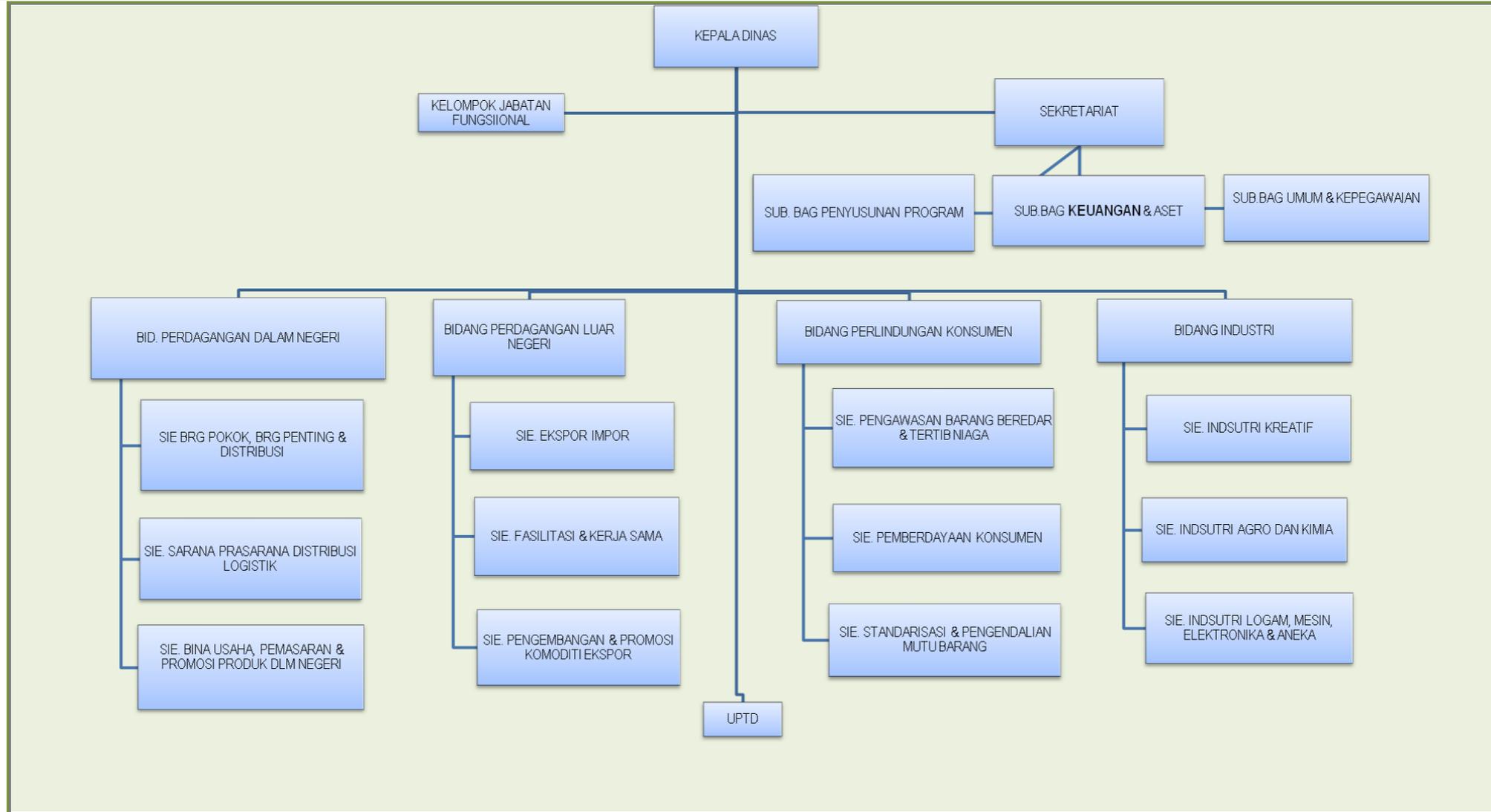
Melaksanakan pelayanan jasa teknis kepada dunia usaha dan masyarakat di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang; Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan teknis pengujian dan sertifikasi mutu barang; Melakukan penyusunan tata kerja pengujian dan sertifikasi; Melaksanakan koordinasi baik pengendalian kegiatan pengujian dan sertifikasi mutu barang maupun sesama Anggota Sistem Jaringan Laboratorium Penguji Mutu; serta menerima dan menyetorkan retribusi atas hasil layanan jasa teknis pengujian mutu barang berupa Penerimaan Asli Daerah (PAD)



Optimalisasi Fungsi Institusi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan karena memegang peran penting dan strategis dalam mengatasi berbagai sektor industri dan perdagangan yang berkembang, yang menjadi tugas pokok dinas merupakan kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, pelaksana fungsi dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing, Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan.



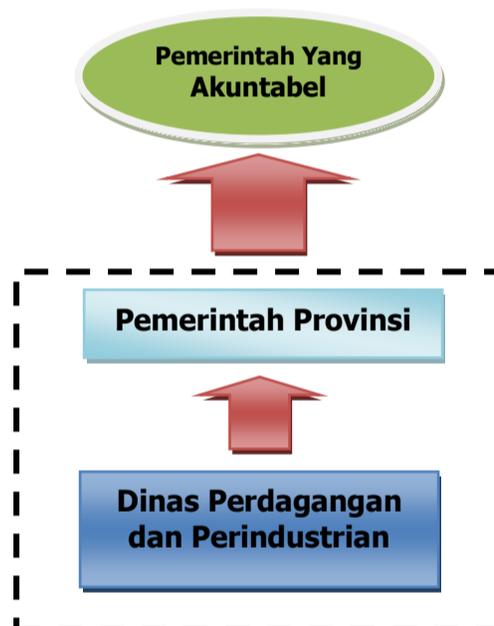
Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERDA No. 54 Th.2016





1.4. LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI

Berbagai kegiatan operasional dan pembinaan bidang perdagangan dan industri merupakan bidang yang memiliki kompleksitas, karena berkaitan langsung dengan pengusaha / pelaku usaha dan masyarakat / konsumen adalah manusia mandiri yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Ketidakseimbangan antara kepentingan individu, pelaku usaha dengan konsumen akan menimbulkan permasalahan lain yang sifatnya dapat meluas dan keluar dari kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri. Oleh karena itulah kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait, Akademisi, assosiasi dan pelaku usaha perlu mendapat perhatian yang lebih serius.





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

2.1 VISI DAN MISI

Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah visi dan misi. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Dalam mencapai visi dan misi dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan, dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Visi merupakan gambaran umum apa yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir periode. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja maka Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan selama 2016-2021 adalah mengikuti visi dan misi Gubernur yaitu pada misi keempat yang berbunyi:

**Menuju Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk
Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah
Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**



Guna menyelaraskan tugas dan fungsi dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, sebagai berikut:

Meningkatkan Inovasi Sektor Perdagangan dan Industri untuk Menggerakkan dan Memfasilitasi Kegiatan Pembangunan Ekonomi Rakyat Yang Saling Bersinergi dan Berkelanjutan Menuju Kalteng “Berkah”

Merealisasikan sebuah visi diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Visi tersebut dijabarkan dengan jelas dalam misi, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi. Sesuai dengan makna dari Visi tersebut, bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan menjadi instansi profesional di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah harus mempunyai **Misi** yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi di atas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menentukan misinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengembangan sektor industri dan nilai tambah industri;
2. Mewujudkan penguatan pangsa pasar
3. Mewujudkan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
4. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas;
5. Mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan



2.2 TUJUAN RENSTRA DAN SASARAN

a. Tujuan

Sesuai Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan **tujuan** sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing sektor industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan penguatan pangsa pasar;
3. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri;
4. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas Kalimantan Tengah;
5. Meningkatkan tertib perdagangan.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan perdagangan dan industri daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dalam rencana strategis pembangunan jangka menengah, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal, dilandasi dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;
3. Meningkatnya nilai ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng;
4. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri;
5. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU inilah yang sebenarnya berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :



Tabel.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang Sektor	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama
A. Bidang Industri	1. Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan sektor industri yg bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	a. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan b. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan
B. Bidang Perdagangan	2. Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah	a. Persentase Pertumbuhan sektor Perdagangan b. Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan
	3. Meningkatnya Nilai Ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng	a. Nilai Ekspor bersih perdagangan Kalteng b. Prosentase Pertumbuhan non migas
	4. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	a. Nilai inflasi Kalteng yang terkendali
	5. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Persentase Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yang ditindak lanjuti b. Persentase Peningkatan pengujian komoditi/ produk mutu ekspor

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian memuat 5 (lima) sasaran strategis. Keempat sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan;
- (2) Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;
- (3) Meningkatnya nilai ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng;
- (4) Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri;
- (5) Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;



Tabel 2.2
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016 – 2021

MISI	1. Mewujudkan pengembangan sektor industri dan nilai tambah industri	2. Mewujudkan penguatan pangsa pasar	3. Mewujudkan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	4. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas	5. Mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
TUJUAN	1. Meningkatkan daya saing sektor industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan;	2. Meningkatkan penguatan pangsa pasar;	3. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	4. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas Kalimantan Tengah	5. Meningkatkan tertib perdagangan
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.	2. Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;	3. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	4. Meningkatnya nilai ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng;	5. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Perjanjian kinerja tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah Tahun 2017 telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Disdagperind Tahun 2017 berdasarkan DPA – SKPD Nomor : 188.44/40/DPA – SKPD/2017, Tanggal 31 Januari 2017 dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.584.230.000,- dengan 11 Program dan 111 Kegiatan. Dan pada tahun berjalan DPA-SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah mengalami perubahan pagu anggaran APBD No. 188.44/435/DPPA-SKPD/2017, Tanggal 04 Oktober 2017 dengan total anggaran Belanja Langsung menjadi Rp.12.365.258.400,00 dengan jumlah kegiatan menjadi 119 (Seratus sembilan belas) kegiatan.

Berikut pada tabel ditampilkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun.



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan sektor industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	a. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	a. 7,50 %	- Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah	2.217.520.000,-
	b. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	b. 16,50 %	- Program Penumbuhan Industri Agro	460.000.000,-
2. Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah	a. Persentase Pertumbuhan sektor Perdagangan	a. 6,70 %	- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	607.500.000,-
	b. Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	b. 11,70 %	- Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	155.000.000,-
3. Meningkatnya Nilai Ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng	a. Nilai Ekspor bersih perdagangan Kalteng	a. US\$ 900 Juta	- Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor	385.000.000,-
	b. Prosentase Pertumbuhan non migas	b. 1,00 %	- Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah	261.000.000,-
			- Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	545.000.000,-
4. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	a. Nilai inflasi Kalteng yang terkendali	a. \pm 3,20 %	- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	330.000.000,-
5. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Persentase Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yang ditindaklanjuti	a. 100	- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.230.000.000,-
	b. Persentase Peningkatan pengujian komoditi/ produk mutu ekspor	b. 10 %	- Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor	1.422.842.000,-

Total anggaran strategis APBD Perubahan Tahun 2017 :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah : Rp. 2.478.520.000,-
2. Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan : Rp. 2.167.500.000,-
3. Program Penumbuhan Industri Agro : Rp. 460.000.000,-
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Eskpor : Rp. 1.820.342.000,-
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri : Rp. 700.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel. 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Provins Kalimantan Tengah Tahun 2017

MISI 1: Mewujudkan pengembangan sektor Industri dan nilai tambah industri							
TUJUAN 1: Meningkatkan daya saing sektor industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan;							
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan;							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017		
1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	7,50 %	12,31	6,49	7,48	8,60	114,62	Sangat Baik
2. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	16,50 %	15,92	16,09	16,33	16,67	101,03	Sangat Baik
MISI 2: Mewujudkan penguatan pangsa pasar							
TUJUAN 2: Meningkatkan penguatan pangsa pasar;							
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017		
3. Persentase Pertumbuhan sektor Perdagangan	6,70 %	7,75	8,28	6,68	8,54	127,41	Sangat Baik
4. Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	11,70 %	11,31	11,60	11,68	12,22	104,44	Sangat Baik
MISI 3: Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas							
TUJUAN 3: Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri;							
SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri;							



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017		
5. Nilai ekspor bersih perdagangan luar negeri Kalteng	US \$ 900 Juta	989,93	991,72	900,69	1.725,99	191,78	Sangat Baik
6. Prosentase Pertumbuhan ekspor non migas	1,00 %	-21,82	-3,09	-9,06	85,87	858,7	Baik
MISI 4: Mewujudkan peningkatan ekspor non migas							
TUJUAN 4: Meningkatkan kinerja ekspor non migas Kalimantan Tengah							
SASARAN STRATEGIS 4: Meningkatnya nilai non migas perdagangan luar negeri Kalteng;							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017		
7. Nilai inflasi Kalteng yang terkendali	3,20 %	6,63	4,20	2,00	3,18	99,38	Baik
MISI 5: Mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							
TUJUAN 5: Meningkatkan meningkatkan tertib perdagangan;							
SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017		
8. Persentase Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yang ditindaklanjuti	100 %	100	100	100	100	100	Sangat baik
9. Persentase Peningkatan pengujian komoditi/ produk mutu ekspor	10 %	14,28	0,72	6,32	14,34	143,40	Sangat Baik

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, terdapat 5 (lima) Misi dan 5 (lima) Tujuan, serta 5 (lima) Sasaran Strategis, adapun analisa dari kelima sasaran strategis untuk mencapai lima tujuan dan lima misi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah akan diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 SASARAN STRATEGI SATU**SASARAN STRATEGI 1 :**

Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri yang Bertumpu pada Sumber Daya Lokal yang Berkelanjutan

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu mewujudkan pengembangan sektor industri dan nilai tambah industri, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu meningkatkan daya saing sektor industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan, maka ditetapkan sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan / formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari kedua IKU, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2 SASARAN STRATEGIS 1
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2014 - 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017			
1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	7,50 %	12,31	6,49	7,48	8,60	114,62	Sangat Baik	
2. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	16,50 %	15,92	16,09	16,33	16,67	101,03	Sangat Baik	

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	7,50 %	8,60	114,62
		2. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	16,50 %	16,67	101,03

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI	
				Thn 2016 (n-1)	Thn 2017 (n)
1.	Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	7,50 %	7,48	8,60
		2. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	16,50 %	16,33	16,67



Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	8,75 %	8,60 %	98,28 %
		2. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	17,50 %	16,67 %	95,25 %

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	8,60 %	4,27 %	Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Kalteng tahun 2017 mencapai Rp. 21,038 triliun memberikan kontribusi sebesar 0,77 % terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp. 2.739,4 Trilyun pada tahun 2017.
		2. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	16,67 %	20,16 %	Nilai PDB ADHB sektor industri pengolahan Nasional tahun 2017 mencapai Rp. 2.739,4 triliun memberikan kontribusi sebesar 20,16 % terhadap Total PDB ADHB Nasional yang mencapai Rp. 13.588,8 triliun pada tahun 2017.

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	7,50 %	8,60	114,62	2.677.520.000	2.241.198.019	83,70
		2. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	16,50 %	16,67	101,03			

3.2.1.1 Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2017 tercatat sebesar 8,60 persen, melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,50 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja satu, sehingga persentase capaiannya sebesar 114,62 persen

Arah kebijakan pembangunan sektor industri dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing melalui fasilitas pengembangan industri agro dan non agro.
2. Peningkatan daya saing melalui melalui penataan struktur industri.
3. Peningkatan produk bahan baku / penolong domestik sebagai bahan baku pengganti / substitudi impor.

Tabel 3.8 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2013 – 2017

TAHUN	NASIONAL (Rp. Trilyun)	KALTENG (Rp. Trilyun)	KONTRIBUSI
2013	1.998,69	11,23	0,56 %
2014	2.215,75	14,31	0,65 %
2015	2.405,40	16,12	0,67 %
2016	2.544,60	18,36	0,72 %
2017	2.739,40	21,04	0,77 %

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor pengolahan Kalimantan Tengah pada tahun 2017 mencapai Rp. 21,038 trilyun memberikan kontribusi sebesar 0,77 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai Rp. 2.739,40 trilyun pada tahun 2017, adapun perbandingannya dapat dilihat pada Grafik 3.1 Industri Pengolahan di Kalteng Tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 8,60 persen bila dibandingkan tahun 2016, melaju dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,68 persen.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kalteng dan Nasional Tahun 2014 - 2017



Sumber : BPS Nasional, BPS Kalteng

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri nasional trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Kalimantan Tengah Tahun 2017 berada diatas pertumbuhan industri nasional, pertumbuhan industri pengolahan Kalteng tahun 2017 mencapai 8,60 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan nasional, yaitu sebesar 4,18 persen.

Terkait dengan capaian diatas, maka berikut diuraikan gambaran kondisi industri di Kalimantan Tengah, baik unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi dan nilai bahan baku sebagai berikut :

a. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Pengolahan Kalimantan Tengah Tahun 2012 – 2017

Perkembangan jumlah Unit Usaha untuk skala industri kecil dari tahun 2016 sebanyak 5.164 Unit Usaha meningkat sebesar 5,00 persen atau 258 Unit Usaha menjadi 5.422 Unit Usaha di Tahun 2017. Untuk industri skala besar sedang perkembangan jumlah unit usaha dari tahun 2016 sebanyak 100 unit usaha meningkat sebesar 5,00 persen atau 5 unit usaha menjadi 105 unit usaha di tahun 2017. Sedangkan perkembangan jumlah unit usaha untuk total keseluruhan semua skala industri menunjukkan kinerja yang menggembirakan, yaitu dari tahun 2016 sebanyak 5.264 unit usaha meningkat sebesar 4,99 persen atau 263 unit usaha menjadi 5.527 unit usaha di tahun 2017

Tabel. 3.9 Data Jumlah Unit Usaha Kalteng

Industri	Satuan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kecil	Unit Usaha	4.401	4.862	4.830	4.644	5.164	5.422
Besar Sedang	Unit Usaha	66	80	81	96	100	105
Total	Unit Usaha	4.467	4.942	4.911	4.740	5.264	5.527

Gambar. 3.2 Data Unit Usaha Kalteng



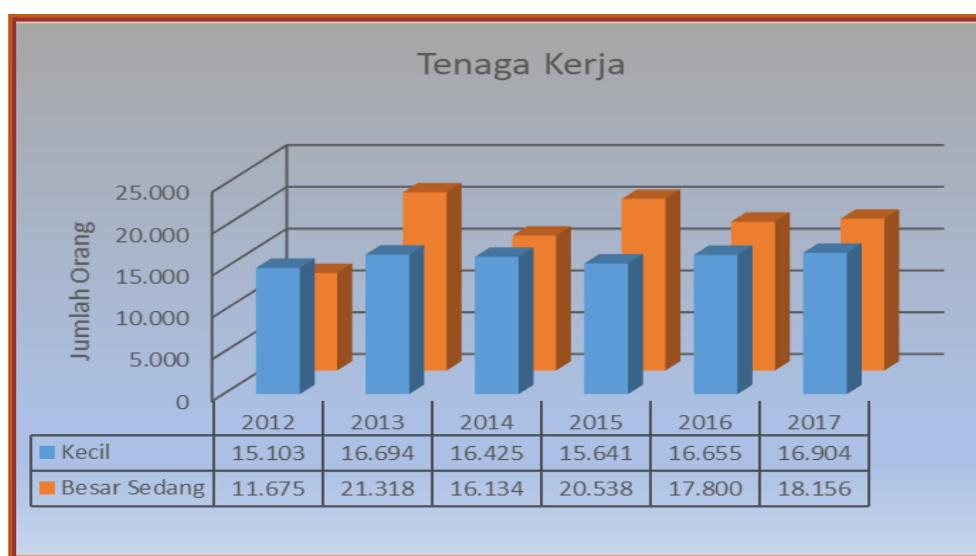
b. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Industri Kalteng Th 2012 - 2017

Untuk Industri Kecil perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2016 sebanyak 16.655 orang meningkat sebesar 1,50 persen atau 249 orang menjadi 16.904 orang di tahun 2017.

Tabel. 3.10 Data Jumlah Tenaga Kerja Industri Kalteng

Skala Industri	Satuan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kecil	Orang	15.103	16.694	16.425	15.641	16.655	16.904
Besar Sedang	Orang	11.675	21.318	16.134	20.538	17.800	18.156
Total	Orang	26.778	38.012	32.559	36.179	34.455	35.060

Gambar. 3.3 Data Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Kalteng



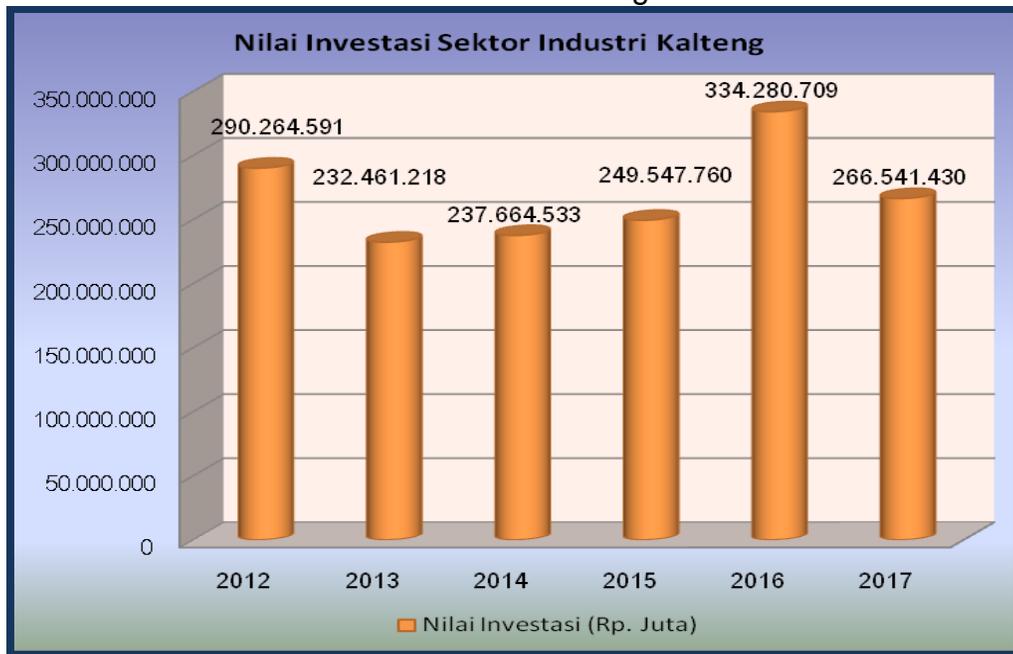
Untuk industri besar sedang perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2016 sebanyak 17.800 orang meningkat sebesar 1,49 persen atau 249 orang menjadi 18.156 orang di tahun 2017. Sedangkan perkembangan Tenaga Kerja untuk total keseluruhan semua skala industri, menunjukkan kinerja yang menggembirakan, yaitu dari tahun 2016 sebanyak 34.455 orang meningkat sebesar 1,75 persen atau 605 orang menjadi 35.060 orang di tahun 2017.

c. Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri Kalteng Tahun 2012-2017

Perkembangan nilai investasi sektor industri di Kalimantan Tengah Tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 266.541.430.000,- turun sebanyak 20,26 persen atau Rp. 67.739.279.000,- dari tahun 2016 dimana tercatat investasi sektor industri dari 14 Kab/ Kota di Kalteng tahun 2016 sebesar Rp. 334.280.709.000,-. Perkembangan nilai investasi sektor industri Kalteng Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel. 3.11 Nilai Investasi Sektor Industri Kalteng

Sektor Industri Kalteng	Satuan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Investasi	Rp. Juta	290.264.591	232.461.218	237.664.533	249.547.760	334.280.709	266.541.430

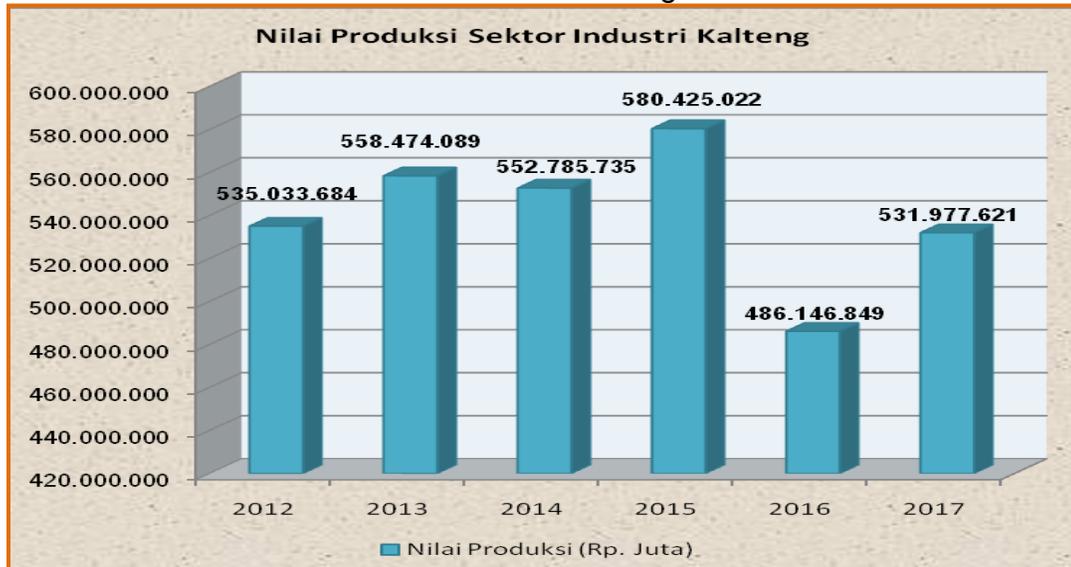
Gambar 3.4
Nilai Investasi Sektor Industri Kalteng Tahun 2012-2017**d. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Industri Kalteng Tahun 2012-2017**

Perkembangan nilai Produksi sektor industri di Kalimantan Tengah Tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 531.977.621.000,- meningkat sebesar 9,43 persen atau Rp. 45.830.772.000,- dari tahun 2016 dimana tercatat nilai produksi sektor industri dari 14 Kab/ Kota di Kalteng tahun 2016 sebesar Rp. 486.146.849.000,-. Perkembangan nilai produksi sektor industri Kalteng Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel. 3.12 Nilai Produksi Sektor Industri Kalteng

Sektor Industri Kalteng	Satuan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Produksi	Rp. Juta	535.033.684	558.474.089	552.785.735	580.425.022	486.146.849	531.977.621

Gambar 3.5
 Nilai Produksi Sektor industri kalteng Tahun 2012-2017



e. Perkembangan Nilai Bahan Baku Sektor Industri Kalteng Tahun 2012-2017

Perkembangan nilai Bahan Baku sektor industri di Kalimantan Tengah Tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 235.657.208.000,- mengalami penurunan sebesar 67,68 persen atau Rp. 493.530.082.000,- dari tahun 2016 dimana tercatat nilai bahan baku sektor industri dari 14 Kab/ Kota di Kalteng tahun 2016 sebesar Rp. 729.187.290.000,-. Perkembangan nilai bahan baku sektor industri Kalteng Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel. 3.13 Nilai Bahan Baku Sektor Industri Kalteng

Sektor Industri Kalteng	Satuan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Bahan Baku	Rp. Juta	202.373.838	253.354.138	238183.352	250.092.520	729.187.290	235.657.208

Gambar 3.6
 Nilai Bahan Baku Sektor industri kalteng Tahun 2012-2017



3.2.1.2 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB dari Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 21.038,4 miliar atau sebesar 16,67 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 126.176,1 miliar atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 16,50 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja kedua, sehingga persentasenya sebesar 101,05 persen.

Kinerja Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.676,7 miliar atau meningkat 14,57 persen jika dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai nilai Rp 18.362,7 miliar

Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun 2 program di bidang Industri yaitu :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini didukung oleh 20 (dua puluh kegiatan) yang mencakup kegiatan industri kreatif, industri agro dan kimia serta industri logam, mesin, elektronika dan aneka. Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.217.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.826.885.919,- atau 82,38 %.

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini didukung oleh 5 (lima) antara lain : Magang teknologi industri pengolahan pangan hasil laut bagi pelaku usaha; Rakor Persiapan Pembangunan Kawasan Industri; Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Komoditi Unggulan; Bimtek Pengembangan Usaha dan sarana Produksi di bidang industri kayu sengon serta pendataan dan identifikasi potensi komoditi logam. Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 460.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.414.312.100,- atau 90,07 %.

Untuk mencapai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan, tentunya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari kendala atau permasalahan yang dihadapi. Berikut permasalahan serta upaya pemecahan masalah untuk mencapai Sasaran 1 ini antara lain :



a) Permasalahan

- Belum adanya kesadaran dari kabupaten/ kota bahwa pendataan yang valid dan *up to date* sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan di bidang pengembangan IKM
- Lemahnya komunikasi dan koordinasi serta belum adanya sinkronisasi antara program/ kegiatan pembangunan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga pelatihan ataupun pembinaan yang dilaksanakan di wilayah kabupaten/ kota tidak dapat didukung oleh dana kabupaten/ kota.
- Peta Panduan atau Roadmap untuk kawasan industri di Kalimantan Tengah masih dalam proses penyusunan.
- Pengembangan industri melalui pendekatan Klaster, OVOP, Komoditi Potensial/ Kompetensi Inti Daerah dan Industri Kreatif belum sepenuhnya didukung oleh kabupaten/ kota.
- Belum optimalnya akurasi data IKM Aneka Industri dan Kerajinan yang ada di daerah kabupaten/ kota.
- Belum optimalnya tindak lanjut hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan pasca kegiatan secara menyeluruh.
- Masih kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM yang berhubungan dengan pelayanan teknis dan pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan
- Masih terbatasnya pengetahuan IKM dalam pengenalan bahan/material logam, sehingga mutu produk yang dihasilkan masih relatif rendah.
- Kurangnya pengembangan desain yang dikembangkan oleh IKM terhadap produk yang dihasilkan.
- Peserta yang mendapatkan pelatihan/ pembinaan adalah berdasarkan rekomendasi dinas indag kabupaten/ kota. Kadang ada yang kurang tepat sasaran
- IKM makanan dan minuman masih banyak yang belum menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik.
- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan IKM pangan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditi hasil pertanian, perkebunan maupun kehutanan baik dalam rasa, jenis, bentuk maupun kemasan. Belum adanya diversifikasi bahan baku agro untuk mengganti bahan baku impor
- Kebijakan Pemerintah tentang Pemberian Hibah Barang/Uang dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat , melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 Ayat (5) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2015, menjadi permasalahan karena KUB yang sudah didata untuk mendapatkan bantuan hibah mesin dan peralatan industri belum siap secara legalitas.



b) Upaya Pemecahan Masalah

- Proses pendataan tahun 2017 dilakukan dengan cara yaitu melalui pendataan industri oleh kabupaten/ kota, serta Badan Pusat Statistik Kalteng
- Sinkronisasi dan sinergisitas program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota masih akan terus dilakukan dan diikuti dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/ Kota untuk memberikan motivasi pada pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung program pengembangan industri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Ataupun sebaliknya Pemerintah Provinsi dapat mendukung kegiatan pengembangan industri yang diprioritaskan oleh kabupaten / kota.
- Peta panduan/ Roadmap untuk kawasan industri di Kalteng perlu disusun agar setiap Pihak yang terkait dapat mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri.
- Komitmen dalam pengembangan industri melalui pendekatan klaster OVOP, komoditi potensial/ kompetensi inti daerah dan industri kreatif perlu diperkuat lagi baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga masing – masing pihak dapat menjalankan perannya dengan baik.
- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten / Kota agar target dalam renstra tercapai dengan adanya anggaran yang memadai;
- Setiap Pelaksana Teknis diarahkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap desain produk industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia IKM, revitalisasi alat dan mesin produksi maupun pembuatan prototype produk guna meningkatkan mutu dan daya saing industri.
- Pada waktu rekrutmen peserta dipersyaratkan syarat minimal peserta yang boleh mengikuti pelatihan.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Disdagperind. guna meningkatkan kemampuan dibidang teknis.
- Koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota sehingga memiliki persepsi yang sama dalam pembinaan IKM
- Pelatihan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan terus dilakukan, terutama di sentra sentra hasil pertanian. Dilakukannya pelatihan teknik produksi industri kepada masyarakat di daerah – daerah yang kaya dengan hasil pertanian, perikanan, perkebunan maupun kehutanan untuk menciptakan wira usaha baru dan meningkatkan nilai tambah produksi.
- Perlunya kerjasama dengan instansi pendidikan yang membantu IKM dalam pengembangan industri.

- Melakukan sosialisasi tentang UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 Ayat (5) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2015 kepada para KUB penerima bantuan hibah mesin dan peralatan industri serta memfasilitasi mereka untuk mendapatkan legalitas
- Untuk meningkatkan kualitas desain produk industri maka dilakukan pelatihan serta fasilitas pendampingan yang lebih intensif pada industri kreatif.

3.2.2 SASARAN STRATEGI DUA

SASARAN STRATEGI 2 :

Meningkatnya Kualitas Perdagangan Dalam Negeri di Kalimantan Tengah

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu mewujudkan penguatan pangsa pasar, serta dapat mencapai tujuan kedua, yaitu meningkatkan penguatan pangsa pasar dalam negeri di Kalimantan Tengah, maka ditetapkan sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah.

Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan / formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari kedua IKU, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.14 SASARAN STRATEGIS 2
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2014 - 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017		
3. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	6,70 %	7,75	8,28	6,68	8,54	127,41	Sangat Baik
4. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	11,70 %	11,31	11,60	11,68	12,22	104,44	Sangat Baik

Tabel 3.15. Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah	3. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	6,70 %	8,54	127,41
		4. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	11,70 %	12,22	104,44

Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI	
				Thn 2016 (n-1)	Thn 2017 (n)
2.	Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah	3. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	7,50 %	6,68	8,54
		4. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	11,70 %	11,68	12,22



Tabel 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN
2.	Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah	3. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	7,30 %	8,54 %	116,98 %
		4. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	11,90 %	12,22 %	102,69 %

Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
2.	Meningkatkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah	3. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	8,54 %	4,44 %	Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Kalteng tahun 2017 mencapai Rp. 15,418 trilyun memberikan kontribusi sebesar 0,87 % terhadap PDB ADHB sektor perdagangan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp. 1.767,7 Trilyun pada tahun 2017.
		4. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	12,22 %	13,01 %	Nilai PDB ADHB sektor perdagangan Nasional tahun 2017 mencapai Rp. 1.767,7 trilyun memberikan kontribusi sebesar 13,01 % terhadap Total PDB ADHB Nasional yang mencapai Rp. 13.588,8 trilyun pada tahun 2017.

Tabel 3.19 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	capaian
2.	Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah	3. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	6,70 %	8,54 %	127,41	607.500.000	576.772.950	94,94
		4. Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	11,70 %	12,22 %	104,44			

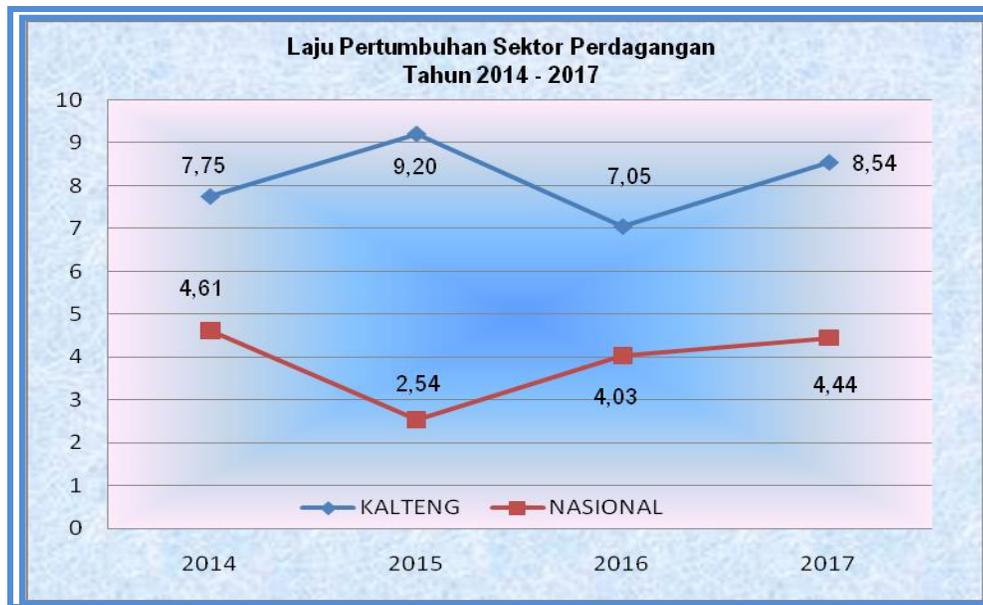
3.2.2.1 Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2017 tercatat sebesar 8,54 persen, melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,70 persen, sebagaimana pada sasaran strategis dua, indikator kinerja ketiga sehingga persentase capaiannya sebesar 127,41 persen

Pertumbuhan sub sektor perdagangan di Kalimantan Tengah selama tahun 2014 - 2016 Kalteng mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sub sektor perdagangan di Kalteng pada tahun 2014 sebesar 7,75 %, kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 8,28 % dan mencapai titik tertinggi. Selanjutnya pertumbuhan sub sektor perdagangan tumbuh melambat sejak tahun 2016 yaitu 6,68 % dikarenakan adanya krisis yang berdampak pada daya jual beli masyarakat. Tetapi untuk tahun 2017 kembali meningkat menjadi 8,54 % masih

melampaui pertumbuhan sub sektor perdagangan nasional yang mencapai 4,44 %. Trend pertumbuhan sub sektor perdagangan Kalimantan Tengah hampir selalui melampaui trend pertumbuhan sub sektor perdagangan Nasional seperti diilustrasikan dalam grafik 3.7.

Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan



Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Kalteng tahun 2017 mencapai Rp 15.418,6 milyar, tumbuh sebesar 16,09 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yaitu sebesar Rp 13.281,6 miliar, serta memberikan kontribusi sebesar 0,87 persen terhadap PDRB ADHB sektor perdagangan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 1.767,7 trilyun pada tahun 2017.

Tabel 3.20 Kontribusi Sektor Perdagangan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2013 – 2017

TAHUN	NASIONAL (Rp. Trilyun)	KALTENG (Rp. Trilyun)	KONTRIBUSI
2013	1.263,82	8,18	0,65 %
2014	1.410,93	10,16	0,72 %
2015	1.534,10	11,63	0,76 %
2016	1.636,00	13,13	0,80 %
2017	1.767,70	15,42	0,87 %

3.2.2.2 Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan

Target kontribusi sub sektor perdagangan terhadap total PDRB ADHB Kalimantan Tengah Tahun 2017 ditetapkan sebesar 11,70 persen, realisasinya telah melampaui target, yaitu sebesar 12,22 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada sasaran strategis keempat, indikator kinerja keempat ini adalah sebesar 104,44 persen.

Gambar 3.8
Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Kalimantan Tengah Terhadap PDRB ADHB Tahun 2014 s.d 2017



Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Kalimantan Tengah pada tahun 2014 - 2017 berkisar pada angka 11-12 persen. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Kalteng tahun 2017 mencapai Rp 15.418,6 miliar memberikan kontribusi sebesar 12,22 persen terhadap Total PDRB ADHB Kalimantan Tengah yang mencapai nilai sebesar Rp 126.176,1 miliar pada tahun 2017.

Tabel. 3.21
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Struktur (ADHB)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,70
2	Pertambangan dan Penggalian	11,44
3	Industri Pengolahan	16,67
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,08
5	Pengadaan Air	0,09
6	Konstruksi	9,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran	12,22
8	Transportasi dan Pergudangan	7,02
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1,91
10	Informasi dan Komunikasi	0,96
11	Jasa Keuangan	3,28
12	Real Estate	2,12
13	Jasa Perusahaan	0,04
14	Administrasi Pemerintahan	6,20
15	Jasa Pendidikan	4,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89
17	Jasa Lainnya	1,02
PRODUK DOMESTIK BRUTO		100

Berkembangnya sektor perdagangan mendorong adanya penerbitan SIUP di Kalteng yang menunjukkan trend yang terus meningkat. Penerbitan **SIUP** atau surat izin usaha perdagangan seperti yang kita kenal adalah surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat ijin ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. Dalam Perpres 54 Tahun 2010

yang mengatur tentang pengadaan maka setiap perusahaan harus memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan; dan memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan untuk dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik; serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi.

Surat Izin Usaha Perdagangan ini berlaku seluruh Indonesia dan apabila perusahaan tersebut pindah alamat dan melakukan kegiatan di daerah lain maka pemegang SIUP ini dapat melaporkan kegiatan usahanya ke Disperindag setempat dan wajib untuk mendaftarkan perusahaannya

Tabel 3.22
Perkembangan Penerbitan SIUP Kalimantan Tengah

No	Jenis SIUP	Penerbitan							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perusahaan Besar (PB)	218	139	70	93	153	100	40	48
2.	Perusahaan Menengah (PM)	775	755	404	587	549	594	439	266
3.	Perusahaan Kecil (PK)	2.896	3.699	3.259	3.662	3.221	3.133	2.783	1.943
	Jumlah	3.889	4.593	4.265	4.342	3.923	3.827	3.262	2.257

Sementara itu, apabila dilihat pada tabel 3.5 tersebut diatas, terjadi penurunan penerbitan SIUP tahun 2017 dibandingkan penerbitan SIUP tahun 2016 di Kalimantan Tengah, dari 3.262 buah SIUP menjadi 2.257 buah atau menurun sebesar 30,81 persen.

Gambar 3.9 Data Perkembangan SIUP Kalteng





Untuk lebih lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut jumlah penerbitan SIUP Tahun 2017 berdasarkan Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Tengah.

Tabel 3.23
Penerbitan SIUP Kalimantan Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	PENERBITAN SIUP			JUMLAH
		PK	PM	PB	
1	Palangka Raya	733	67	2	802
2	Kotawaringin Timur	204	36	4	244
3	Kotawaringin Barat	98	41	1	140
4	Kapuas	68	17	1	86
5	Katingan	184	10	0	194
6	Barito Selatan	33	35	20	88
7	Pulang Pisau	130	7	1	138
8	Seruyan	20	6	10	36
9	Barito Timur	143	29	4	176
10	Barito Utara	45	5	0	50
11	Murung Raya	29	4	1	34
12	Gunung Mas	112	1	0	113
13	Lamandau	87	5	3	95
14	Sukamara	57	3	1	61
JUMLAH TOTAL		2.783	1.943	266	2.257

Berdasarkan data tersebut apabila diperhatikan bahwa dalam tahun 2017 yang lebih dominan daerah dalam penerbitan SIUP yakni Kota Palangka Raya yaitu 35,53 % dari total penerbitan SIUP di Kalimantan Tengah, disusul Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 10,81 %, dan Katingan sebesar 8,59 % serta diikuti oleh Kabupaten lainnya.

Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatkan kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun 2 (dua) Program di Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Yaitu :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini didukung oleh 12 (dua belas kegiatan) yang antara lain Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Kalimantan Tengah serta memberdayakan konsumen. Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 607.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.576.772.950,- atau 94,94 %. Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yang multilevel bukan saja kepada dunia usaha dan konsumen tetapi juga masyarakat, antara lain berupa :

- Jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat melalui peningkatan pasar dan distribusi produk serta pembinaan pasar.
- Pengembangan pasar dalam negeri melalui promosi, pameran, himbauan penggunaan produk dalam negeri.



- Pemberdayaan pelaku usaha dagang mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, dan kemitraan usaha.

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini didukung oleh 2 (dua) antara lain : Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan dan kegiatan Pengolahan dan analisis data industri dan perdagangan Kab/Kota di Kalteng. Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 155.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.144.720.000,- atau 94,94 %.

Adapun permasalahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah untuk mencapai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis kedua, yaitu meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalteng , serta upaya pemecahan masalah antara lain :

a) **Permasalahan**

- Meskipun koordinasi dalam rangka pengendalian telah dilakukan tetapi inflasi masih mengalami fluktuasi yang elastis dikarenakan adanya beberapa faktor penyumbang inflasi diluar kendali Disdagperind. Prov Kalteng seperti kenaikan tarif angkutan, tarif dasar listrik, dan harga bahan bakar minyak.
- Masih banyak dan sering terjadi disparitas harga antara kab / kota satu dengan yang lain.
- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam pengurusan legalitas usaha seperti Ijin SIUP, TDP, Ijin Gudang, dan lain-lain.
- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya promosi terhadap produk yang dihasilkan maupun produk yang dijual di pasar.
- Masih rendahnya kesadaran pedagang pasar akan pentingnya pemeliharaan dan kebersihan sarana dan prasarana pasar rakyat.

b) **Upaya pemecahan masalah**

- Tim Pengendali Inflasi Kalimantan Tengah perlu melibatkan berbagai pihak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap inflasi.
- Diperlukan pelayanan informasi publik yang transparan kepada masyarakat sehingga dapat memperkecil disparitas harga.
- Meningkatkan jumlah produk pelaku usaha perdagangan di kabupaten / kota dalam pelaksanaan promosi baik lokal maupun nasional.
- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya revitalisasi pasar menuju ke pasar yang bersih, tertib, nyaman dan aman.

3.2.3 SASARAN STRATEGI TIGA
SASARAN STRATEGI 3 :

Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas Perdagangan Luar Negeri Kalteng

Untuk dapat mencapai misi ketiga, yaitu mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas serta dapat mencapai tujuan ketiga, yaitu meningkatkan kinerja ekspor non migas, maka ditetapkan sasaran strategis yang ketiga, yaitu Meningkatkan Net ekspor non migas Kalimantan Tengah. Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga, serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utama nya, akan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel. 3.24 SASARAN STRATEGIS 3
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2014 - 2017**

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017		
5. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US \$ 900 juta	989,93	991,72	900,69	1.725,99	191,77	Sangat Baik
6. Persentase Pertumbuhan ekspor nonmigas kalteng	1,00 %	-21,82	-4,68	-9,06	87,85	878,5	Sangat Baik

Tabel 3.25. Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya Nilai ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri Kalteng	5. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US \$ Juta)	900	1.725,99	191,77
		6. Persentase Pertumbuhan ekspor nonmigas kalteng	1 %	87,85	878,5

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI	
				Thn 2016 (n-1)	Thn 2017 (n)
3.	Meningkatnya Nilai ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri Kalteng	5. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US \$ Juta)	900	900,69	1.725,99
		6. Persentase Pertumbuhan ekspor nonmigas kalteng	1 %	-9,06 %	878,5



Tabel 3.27. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN
3.	Meningkatnya Nilai ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri Kalteng	5. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US \$ Juta)	1.050	1.725,99	164,38%
		6. Persentase Pertumbuhan ekspor nonmigas kalteng	1,15	87,85	763,9

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
3.	Meningkatnya Nilai ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri Kalteng	5. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US \$ Juta)	1.725,99	20.404,9	- Nilai Ekspor Non Migas Nasional Tahun 2017 mencapai US\$ 152.990,3 Juta, sedangkan Nilai Impor Non Migas Nasional mencapai US\$ 132.585,4 Juta, sehingga Nilai Net Ekspor Non Migas Nasional Tahun 2017 Surplus US\$ 20.404,9 Juta. - Nilai Ekspor Non Migas Kalteng Tahun 2017 mencapai US\$ 1.794,50 Juta, sedangkan Nilai Impor Non Migas Kalteng mencapai US\$ 68,51 Juta, sehingga Nilai Net Ekspor Non Migas Kalteng Tahun 2017 Surplus US\$ 1.725,99 Juta
		6. Persentase Pertumbuhan ekspor nonmigas kalteng	87,85	15,95	- Nilai Ekspor Non Migas Nasional Tahun 2017 mencapai US\$ 152.990,3 Juta, tumbuh sebesar 15,95 persen dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai US\$ 132.080,7 Juta. - Nilai Ekspor Non Migas Kalteng Tahun 2017 mencapai US\$ 1.794,50 Juta, tumbuh sebesar 85,72 persen dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai US\$ 966,25 Juta.

Tabel 3.29 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	capaian
3.	Meningkatnya Nilai ekspor non migas Perdagangan Luar Negeri Kalteng	5. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US \$ Juta)	900	1.725,99	191,78	1.191.000.000	1.145.006.860	96,14
		6. Persentase Pertumbuhan ekspor nonmigas kalteng	1,00 %	87,85 %	87,85			

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran tiga adalah sebagai berikut :

3.2.3.1 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalteng

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalimantan Tengah tahun 2017 ditetapkan surplus sebesar US\$ 1.725,99 Juta, realisasi kinerja pada tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu surplus sebesar US\$ 900 Juta, sehingga persentasenya adalah sebesar 191,78 persen.



Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi andalan ekspor Kalimantan Tengah selalu mencatatkan kinerja surplus dengan nilai ekspor yang lebih besar daripada impor. Berdasarkan lokasi ekspor, Kalimantan Tengah memiliki tiga lokasi yaitu melalui Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas dengan presentase masing-masing sebesar 54%, 40%, dan 6%. Hal ini disebabkan akses pelabuhan yang baik dan memadai hanya dimiliki oleh ketiga kabupaten tersebut. Terkonsentrasinya ekspor Kalteng pada 3 (tiga) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota meminimalisasi potensi yang dimiliki.

Komoditas-komoditas ekspor Kalteng didominasi oleh bahan-bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan. Rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari ekspor bahan mentah ini dapat menjadi potensi yang tinggi apabila diiringi dengan adanya industri hilir yang dapat meningkatkan barang menjadi setengah jadi / barang jadi.

Pada tahun 2017 ekspor dan impor non migas Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yaitu ekspor naik sebesar US\$ 828,25 juta sedangkan impor naik sebesar US\$ 4,67 juta, sehingga nilai ekspor (non migas) bersih perdagangan masih surplus sebesar US\$ 1.725,99 juta, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar US\$ 900 juta. Sementara itu pada sisi ekspor mengalami pertumbuhan secara signifikan sebesar 87,85 persen jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk Tahun 2016, Nilai ekspor non migas Kalimantan Tengah mencapai US\$ 966,25 juta sedangkan nilai impor pada periode yang sama tahun 2016 mencapai US\$ 63,84 juta, maka nilai ekspor bersih perdagangan mengalami surplus sebesar US\$ 902,41 juta.

**Tabel 3.30 Perkembangan Ekspor dan Impor Kalteng
Tahun 2013 – 2017**

Kalteng	2013	2014	2015	2016	2017
Ekspor (US \$ Juta)	1.402,69	1.096,62	1.062,69	966,39	1.794,50
Impor	82,65	106,69	70,97	63,84	68,51
Ekspor Bersih	1.320,04	989,93	991,72	902,41	1.725,99

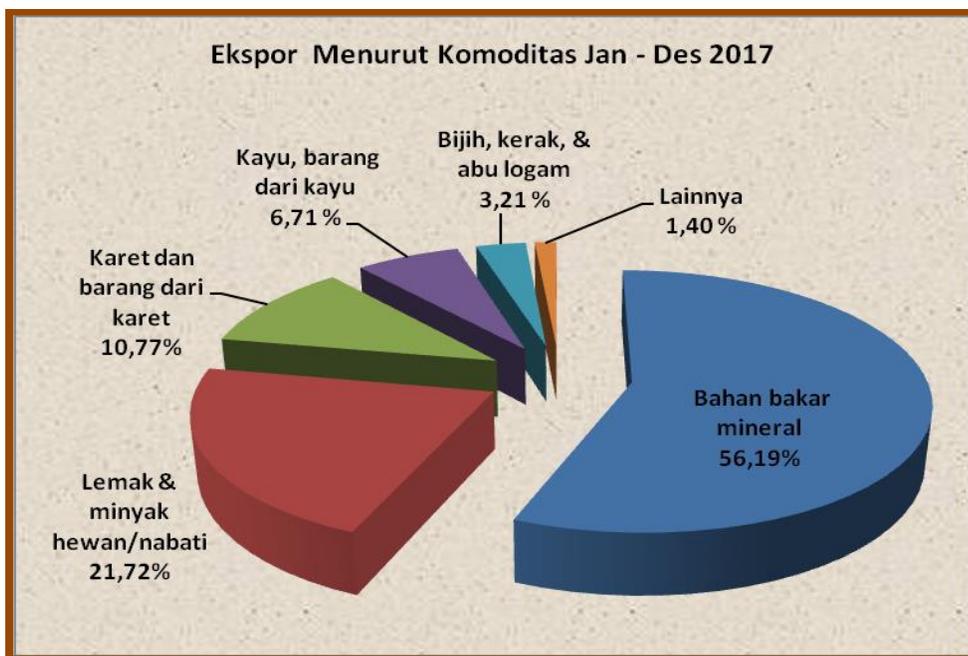
Selama Januari-Desember 2017, total nilai ekspor secara keseluruhan tercatat US\$ 1.794,50 juta, meningkat US\$ 828,11 juta atau sebesar 85,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar US\$ 96,3 juta.

Tabel 3.31 Ekspor Kalimantan Tengah Menurut Komoditas Januari - Desember 2017 (US \$ Juta)

Komoditas	Nilai FoB (Juta US\$)				% Perubahan Nov-Des 2017 (juta US\$)	% Perubahan Jan-Des 2016-2017	% peran thd total Jan-Des 2017
	Nov 2017*)	Des 2017	Jan – Des 2016	Jan-Des 2017			
1. Bahan bakar mineral	69,48	86,17	547,75	1.008,33	24,02	84,09	56,19
2. Lemak & minyak hewan/nabati	39,61	9,17	159,00	389,73	-76,85	145,11	21,72
3. Karet dan barang dari karet	15,97	9,38	101,33	193,22	-41,26	90,68	10,77
4. Kayu, barang dari kayu	8,67	10,89	95,62	120,42	25,61	25,94	6,71
5. Bijih, kerak, dan abu logam	6,24	8,80	37,94	57,55	41,03	51,69	3,21
6. Lainnya	1,47	1,22	24,61	25,25	-17,14	2,57	1,40
TOTAL EKSPOR	141,44	125,63	966,25	1.794,50	-11,18	85,72	100,00

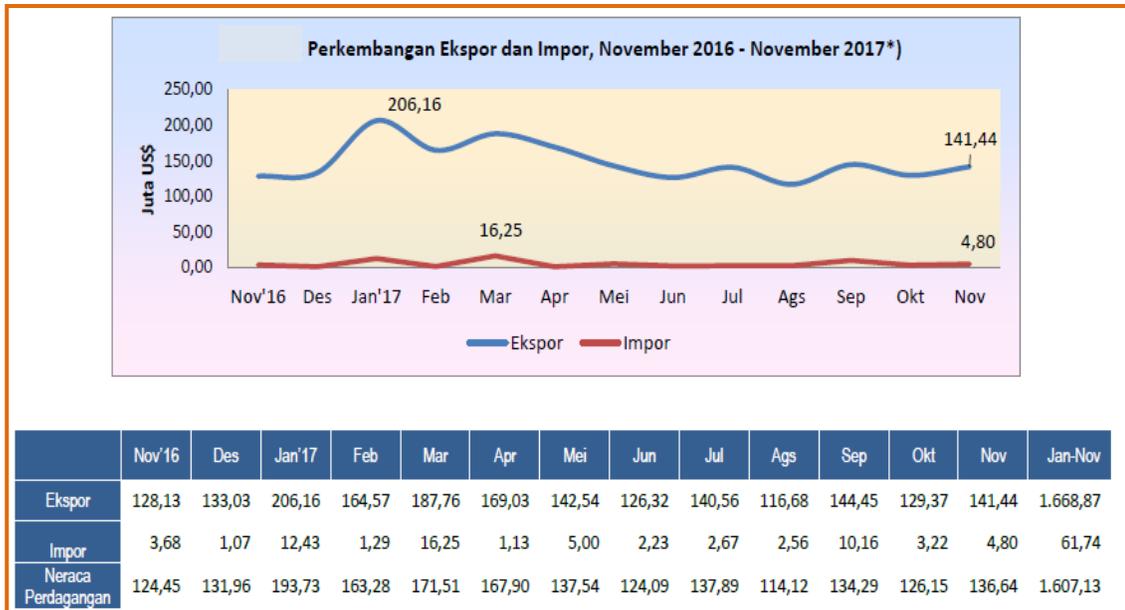
Selama dua belas bulan terakhir, kelompok bahan bakar mineral masih mendominasi pangsa ekspor senilai US\$ 1.008,33 juta atau 55,19 persen dari total ekspor, disusul lemak dan minyak hewani/nabati senilai US\$ 389,73 juta (21,72 persen), karet dan barang dari karet senilai US\$ 193,22 juta (10,77 persen), kayu dan barang dari kayu senilai US\$ 120,42 juta (6,56 persen), serta bijih, kerak dan abu logam senilai US\$ 57,55 juta (3,21 persen). Sementara itu, nilai ekspor kelompok komoditas lainnya senilai US\$ 25,25 juta atau berkontribusi sebesar 1,40 persen

Gambar 3.10 Komposisi Ekspor Menurut Kelompok Komoditas Utama Januari – Desember 2017



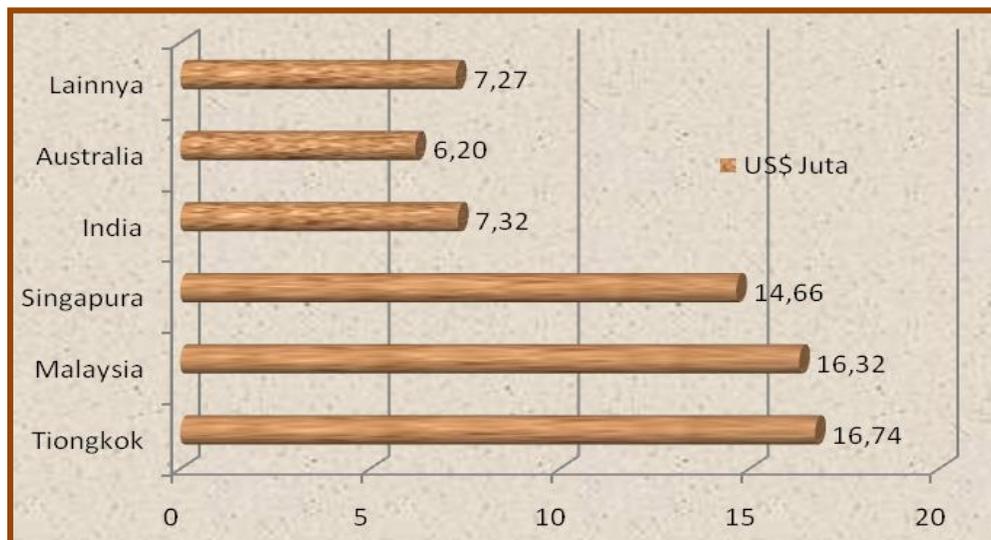
Nilai impor Kalimantan Tengah selama Tahun 2017 secara keseluruhan tercatat sebesar US\$ 68,51 juta. Nilai impor ini mengalami kenaikan sebesar US\$ 4,67 juta atau naik 7,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu US\$ 63,84 Juta. sama tahun sebelumnya. Neraca perdagangan dengan seluruh mitra dagang utama selama 11 bulan terakhir mengalami surplus sebesar US\$ 1,607,13 juta.

Gambar 3.11 Perkembangan Ekspor dan Impor Kalteng



Selama tahun 2017, impor Kalteng menurut negara asal masih didominasi oleh beberapa negara mitra dagang impor meliputi Tiongkok (US\$ 16,74 juta), Malaysia (US\$ 16,32 juta), Singapura (US\$ 14,66 juta), Australia (US\$ 6,20 juta)

Gambar 3.12 Impor Menurut Negara Asal



3.2.3.2 Prosentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas Kalteng

Target yang ditetapkan untuk pertumbuhan ekspor non migas tahun 2017 adalah sebesar 1,00%, dan realisasinya meningkat secara signifikan sebesar 87,85 %, dengan tingkat capaian 878,5 %, sehingga target pertumbuhan ekspor non migas telah jauh melampaui target.

Indikator Persentase Nilai ekspor non migas Kalimantan Tengah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami trend perlambatan pertumbuhan, dan pada tahun 2014 penurunan yang sangat tajam dengan prosentase sebesar



(-)21,82% dan pada 2015 terdapat masih terdapat penurunan sebesar (-)3,09% demikian juga untuk tahun 2016, penurunan sebesar (-)9,06%. Penurunan ekspor salah satunya disebabkan oleh harga minyak global yang mengalami penurunan. Sebagian di antaranya tentu karena kenaikan harga komoditas global seperti minyak bumi, minyak sawit, karet, dan batu bara. Belum pulihnya krisis ekonomi yang melanda negara-negara besar yang selama ini menjadi tujuan ekspor yang potensial menjadi salah satu penyebab tertekannya ekspor. Selain itu menurunnya daya beli sebagai akibat melemahnya nilai rupiah terhadap US\$ mengakibatkan dunia usaha mengurangi impor bahan baku/ bahan penolong maupun mesin/ peralatan. Berkurangnya pasokan bahan baku/ penolong tersebut menyebabkan kapasitas produksi berkurang, sehingga mengakibatkan ekspor juga berkurang.

Nilai ekspor non migas Kalimantan Tengah untuk tahun 2017 mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa kinerja perdagangan luar negeri sudah mulai membaik. Jepang, India dan Tiongkok merupakan mitra dagang paling utama yang berkontribusi naiknya nilai ekspor Kalimantan Tengah. Ketiga negara tersebut memperlihatkan perkembangan yang tinggi dalam permintaan produk dari Kalimantan Tengah, karena tingginya pertumbuhan industri dan ekonomi di negara tersebut, sehingga peningkatan ekspor ke-3 negara tersebut berkembang dengan pesat.

Kinerja perdagangan luar negeri merupakan akumulasi hasil kerja dari seluruh *stake holder*, mulai dari hulu hingga hilir. Timbulnya masalah atau hambatan pada salah satu tahapan atau bagian akan berpengaruh terhadap keseluruhan hasil kinerja perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, masalah perdagangan internasional adalah masalah bangsa, oleh karenanya upaya untuk mengatasinya memerlukan partisipasi semua pihak. Perdagangan luar negeri yang merupakan bisnis antar negara dipengaruhi oleh faktor internal (situasi dan kondisi dalam negeri) serta faktor eksternal (kondisi global). Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor diantaranya menyangkut produk/ komoditi (standard kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan, keamanan dan keselamatan), transportasi, logistik, regulasi, serta ketangguhan dan keuletan pelaku usaha/ eksportir. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain hasil perundingan kerjasama perdagangan luar negeri, isu-isu internasional terkait K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan), serta kondisi ekonomi global.

Sebagaimana tersebut diatas, bahwa kegiatan eksportasi merupakan proses yang melibatkan mata rantai kegiatan yang cukup panjang, mulai dari bahan baku, proses produksi, promosi, pemasaran, distribusi, fiskal, perbankan, regulasi serta sarana-prasarana pendukung lainnya. Oleh karena itu strategi yang diterapkan

diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan pada tiap-tiap mata rantai kegiatan ekspor, antara lain :

1. Pendekatan Pasar

- Dari sisi pemasaran, perlu dioptimalkan untuk identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik, serta menjalin hubungan dengan *buyer* dalam rangka mempertahankan penguasaan pasar ekspor.
- Menggencarkan promosi di dalam negeri baik skala internasional, nasional, maupun daerah.
- Meningkatkan pengamanan perdagangan produk Indonesia di pasar internasional (tuduhan *dumping*, *safeguards*, dan subsidi oleh negara tujuan ekspor).

2. Pendekatan Regulasi/Kebijakan dan lain-lain:

- Melakukan sinkronisasi peraturan ekspor serta sosialisasi kepada stake holder dan dunia usaha yang bergerak di bidang ekspor.
- Penerapan strategi hilirisasi, yaitu melakukan ekspor dalam bentuk produk-produk hilir untuk meningkatkan nilai tambah.
- Penyusunan / pemetaan pengusaha potensial UKM yang berorientasi ekspor.
- Peningkatan kerjasama antar daerah/ provinsi
- Kemudahan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP).
- Koordinasi dengan stake holder dan dunia usaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi eksportir.
- Penyelenggaraan berbagai pelatihan ekspor.

Tabel 3.32 :
Kontribusi Ekspor Impor Kalteng Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional
(Th. 2010-2017)

No	Thn	Ekspor Kalteng (us\$ juta)	Ekspor Nasional	Kontribusi Kalteng (%)	Impor Kalteng (us\$ juta)	Impor Nasional	Kontribusi Kalteng (%)
1	2010	443,09	129.739,50	0,34	57,49	108.250,60	0,05
2	2011	1.339,65	162.019,60	0,83	88,79	136.734,00	0,06
3	2012	1.152,67	153.042,80	0,75	135,09	149.125,30	0,09
4	2013	1.400,00	149.918,80	0,93	82,65	141.362,30	0,06
5	2014	1.096,62	145.960,80	0,75	106,69	134.718,90	0,08
6	2015	1.062,69	131.700,60	0,81	70,97	118.126,40	0,06
7	2016	966,39	131.346,53	0,74	65,70	116.925,94	0,06
8	2017	1.794,50	152.990,3	1,17	68,51	132.585,40	0,05



Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis Ketiga , yaitu Meningkatnya nilai ekspor non migas Kalteng, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun 2 (dua) program, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Program Pengembangan IKM, adapun rincian programnya adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu:

- Pengawasan dan penilikan kualitas produk ekspor karet
- Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan mutu Bokar (Bahan Olahan Karet)
- Identifikasi Potensi Ekspor
- Pelatihan Ekspor
- Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
- Pelatihan akses dan survey pasar ekspor

Pagu anggaran program ini sebesar Rp.385.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.351.159.660,- atau sebesar 91,21 persen.

2. Program Pengembangan IKM

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- Pameran Produk Kerajinan Unggulan
- Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia
- Pameran Produk Unggulan Dekranasda

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 261.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.257.844.700,- atau sebesar 98,79 persen.

Untuk mencapai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatnya nilai ekspor non migas Kalteng, tentunya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari kendala atau permasalahan yang dihadapi. Berikut permasalahan serta upaya pemecahan masalah untuk mencapai Sasaran 3 ini antara lain :

a) Permasalahan

- Masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait dengan kegiatan ekspor – impor secara terintegrasi untuk memudahkan pengendalian dan pengambilan keputusan oleh stake holder.
- Impor masih didominasi oleh impor bahan baku, dimana hal ini disebabkan oleh kualitas yang dibutuhkan oleh industri belum tersedia di dalam negeri, walaupun tersedia pada umumnya harga tidak bersaing dan secara kuantitas belum bisa berkesinambungan.

- Kebutuhan akan hasil-hasil pertanian belum sepenuhnya tercukupi oleh produksi dalam negeri, seperti kedelai, bawang putih dan lainnya.
- Sumber Daya Manusia (SDM) industri dalam negeri belum optimal dalam penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di tingkat perusahaan sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing.

b) Upaya Pemecahan Masalah :

- Penyempurnaan aplikasi pengendalian impor-ekspor agar mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh stake holder.
- Melakukan koordinasi antar provinsi dalam rangka mensubstitusi bahan baku impor dengan komoditi agro yang tersedia di nusantara.
- Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan.

3.2.4 SASARAN STRATEGI EMPAT

SASARAN STRATEGI 4 :

Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Untuk dapat mencapai misi keempat, yaitu mewujudkan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, serta dapat mencapai tujuan keempat, yaitu meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah, maka ditetapkan sasaran strategis keempat yaitu meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri. Dalam sasaran strategis yang keempat ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan / formula tertentu, adapun akan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel. 33 SASARAN STRATEGIS 4
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2014 - 2017**

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017		
7.Nilai Inflasi Kalteng yang terkendali	3,20 %	6,79	4,20	2,00	3,18	99,38	Baik

Tabel 3.34 . Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN (%)
4.	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1. Nilai inflasi Kalteng yang terkendali	3,20 %	3,18 %	99,38



Tabel 3.35 . Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI	
				Thn 2016 (n-1)	Thn 2017 (n)
4.	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7. Nilai inflasi Kalteng yang terkendali	3,20 %	2,00 %	3,18 %

Tabel 3.36. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN
4.	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7. Nilai inflasi Kalteng yang terkendali	3,50	3,18	90,85 %

Tabel 3.37. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
4.	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7. Nilai inflasi Kalteng yang terkendali	3,18	3,61	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Inflasi Kalteng tahun berjalan tercatat sebesar 3,18 %. Lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 3,20 %. Dengan demikian kinerja Pemda Prov Kalteng bersama dengan TIPD telah berjalan dengan baik, karena inflasi yang terjadi di Kalteng masih dalam kondisi terkendali. - Nilai Inflasi Nasional tahun berjalan tercatat sebesar 3,61 % masih di bawah 4 persen, jauh dibanding yang sebelumnya diprediksi Bank Indonesia (BI). Kebijakan dan upaya pemerintah yang diambil telah dapat mengendalikan tingginya inflasi yang terjadi pada Tahun 2017.

Tabel 3.38 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	capaian
4.	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7. Nilai inflasi Kalteng yang terkendali	3,20	3,18	99,38	330.000.000	303.989.500	92,12

Analisa atas capaian indikator sasaran empat adalah sebagai berikut :

3.2.4.1 Nilai Inflasi Kalteng yang terkendali

Nilai inflasi Kalteng pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,18 persen hampir mendekati dari target yang ditetapkan sebesar 3,20 persen, sebagaimana pada sasaran strategis empat, indikator kinerja ketujuh, sehingga persentasenya sebesar 99,38 persen



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Kalteng, laju inflasi tahun kalender 2017 berkisar 3,18 persen. Tingkat inflasi yakni merupakan gambaran harga secara umum yang terjadi di suatu daerah yang merupakan pengaruh dari tingkat fluktuasi harga yang menyebabkan kondisi harga tidak stabil, sedangkan pengaruh-pengaruh ini selalu dijaga atau diantisipasi dengan baik dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Instansi/ Dinas/ Badan yang terkait dan meningkatkan kelancaran distribusi, mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap harga barang kebutuhan pokok masyarakat ke daerah-daerah yang cukup rawan terjadinya kenaikan harga yang selalu memicu tingkat inflasi suatu daerah.

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Pengelompokan Inflasi

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yaitu : Kelompok Bahan Makanan ; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Perumahan; Kelompok Sandang ;Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan dan Olah Raga dan Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

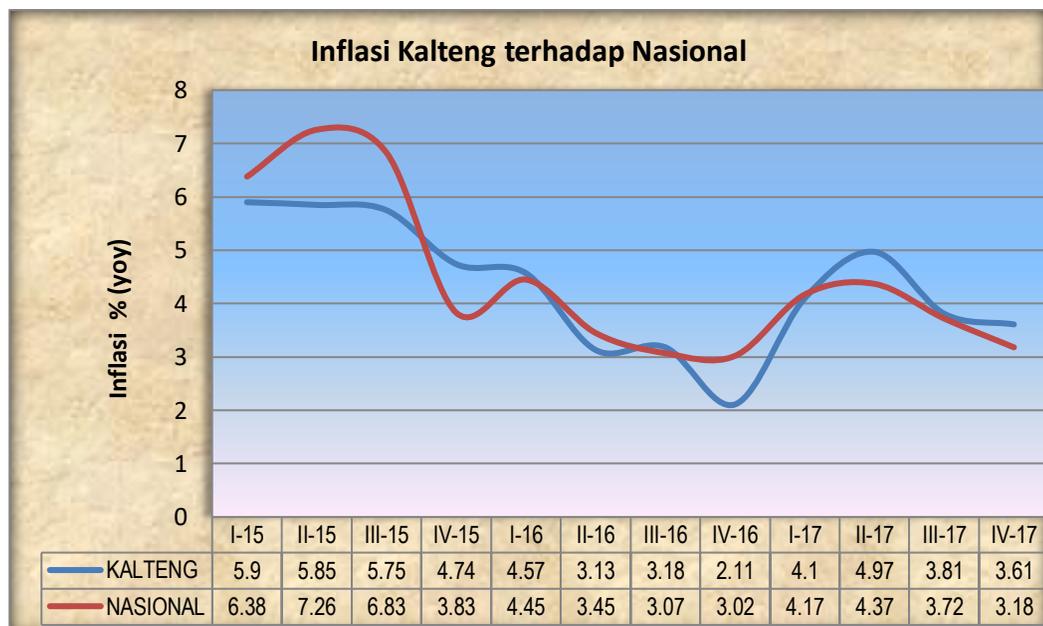
Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Target nilai inflasi di Kalimantan Tengah yang terkendali sebesar $\pm 3,20\%$ sedangkan realisasi inflasi di Kalimantan Tengah Tahun 2017 sebesar 3,18% sehingga mencapai 99,38%. Pada triwulan IV 2017, inflasi Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Laju Inflasi Kalteng tercatat 3,18% (yoy) lebih rendah dari triwulan III 2017 sebesar 3,81% (yoy). Turunnya laju inflasi ini seiring dengan turunnya inflasi di sebagian besar provinsi di Kalimantan dan Nasional. Inflasi Kalteng dan nasional turun di Triwulan IV disebabkan disebabkan upaya pemerintah dalam menjaga pergerakan harga pangan atau volatile food.

Gambar 3.13 Inflasi Kalteng terhadap Nasional



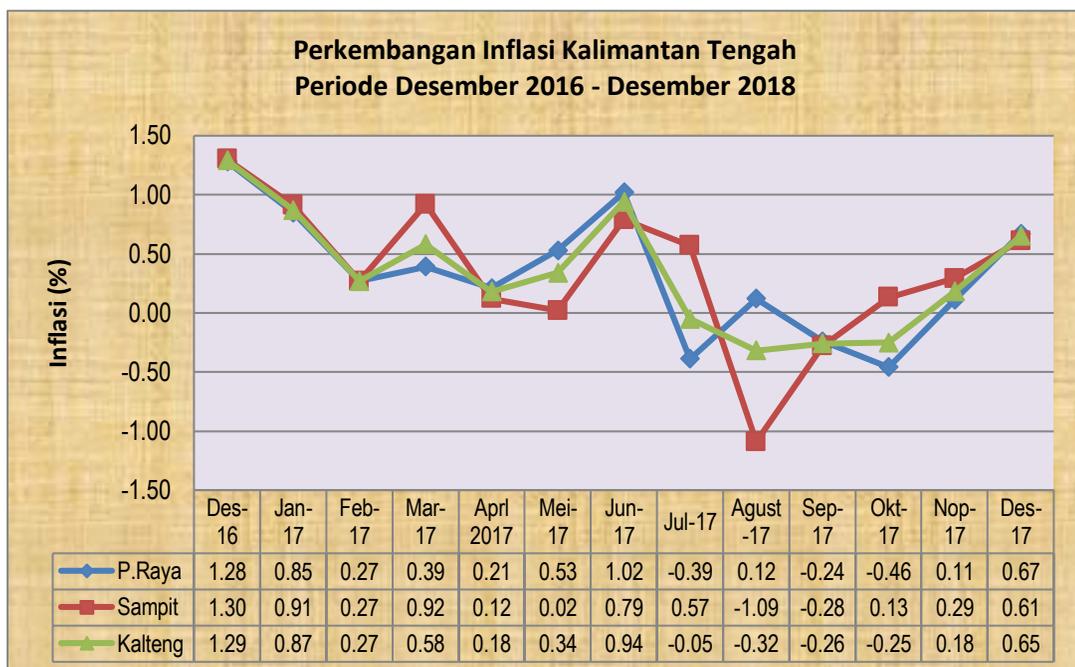
Bahkan angka inflasi tingkat nasional di bawah 4 persen, jauh dibanding yang sebelumnya diprediksi Bank Indonesia (BI). Besaran inflasi pada 2017 disebabkan oleh kebijakan pemerintah yakni adanya harga barang atau jasa yang diatur oleh pemerintah, mulai harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Tren 2017 yang berkontribusi paling tinggi adalah pada saat kenaikan harga listrik, tapi harga

pangan dan dari sisi *core inflation* cukup stabil, bahkan harga pangan mengalami penurunan tajam.

Laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar akan mengalami penurunan pada triwulan IV 2017. Tidak adanya rencana penyesuaian harga energi terutama tarif listrik dari pemerintah pusat pada triwulan IV mendorong meredanya tekanan inflasi dari kelompok ini. Perkembangan harga minyak dunia relatif stabil serta tingkat inflasi yang terjaga mengindikasikan belum diperlukan adanya harga energi domestik.

Dan pada triwulan IV 2017, tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok & tembakau mengalami peningkatan. Peningkatan inflasi pada kelompok bahan makanan utamanya disebabkan karena kebutuhan bahan makanan menjelang dan pada saat perayaan Hari Raya Natal dan Tahun baru. Selain itu, tingkat curah hujan yang mencapai puncak siklus tahunan pada ahir triwulan IV 2017 menghambat produksi bahan makanan. Tingkat curah hujan yang tinggi mempengaruhi tinggi rendahnya gelombang laut yang dapat mengganggu mobilitas pelayaran yang berdampak pada kelancaran proses distribusi komoditas antar pulau.

Gambar 3.14 Perkembangan Inflasi Kalimantan Tengah



Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2017 dalam upaya ikut serta dalam pengendalian inflasi daerah telah mengadakan kegiatan berupa penyelenggaraan Pasar Murah menjelang hari besar keagamaan serta mengadakan kegiatan Pasar Penyeimbang.

Gambar 3.15 Pasar Penyeimbang Tahun 2017



Gambar 3.16 Pasar Murah Tahun 2017



Guna mencapai target laju inflasi tetap konsisten yakni berada di level cukup rendah, terutama pengendalian inflasi menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2018, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalteng membuat sebuah *roadmap* penanganan inflasi Kalteng.

Dalam *roadmap* pengendalian inflasi ini, menitikberatkan kepada komoditas-komoditas kebutuhan, yang pertama adalah beras. Beras merupakan komoditi yang ikut andil dalam menyumbang inflasi di Kalteng termasuk daerah lain, permasalahan yang sekarang, minimnya produksi lokal, keterbatasan akses keuangan petani padi, dan teknologi yang digunakan petani. Berdasarkan kendala dari sisi tata niaga, minimnya kondisi logistik, transportasi yang belum mendukung, sehingga



mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Persoalan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara diantaranya yakni adanya pasar penyeimbang dan peningkatan pendidikan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Komoditi yang kedua adalah daging ayam ras. Menyangkut persoalan komoditi daging ayam ras yang merupakan salah satu adil penyumbang inflasi, Pemprov Kalteng sudah membuat kandang penyeimbang untuk mensuplay ke pasar penyeimbang. Komoditi yang ketiga, bawang merah, yang juga penyumbang andil inflasi cukup tinggi. Permasalahannya saat ini dimana produksinya sendiri masih kurang memadai baik jangka menengah dan panjang. Program klaster bawang merah perlu semakin digiatkan, terutama perlu adanya kepastian RTRWP, akses keuangan terbaru, serta pengembangan kompetensi SDM.

Komoditi berikutnya yang perlu difokuskan adalah cabai merah dimana pasokan yang ada di Provinsi Kalteng dipenuhi dari provinsi lain atau luar daerah. Hal ini disebabkan minimnya produksi dari dalam Provinsi Kalteng. Selain itu melakukan kemudahan akses keuangan kepada pelaku usaha, serta di dukung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng. Dan komoditi terakhir yakni komoditas daging sapi. Permasalahan yang utama adalah dimana komoditas daging sapi mengalami defisit dari angka kebutuhannya. Belum lagi daging sapi dipenuhi pasokan yang berasal dari luar daerah. Maka Pemerintah Provinsi Kalteng harus dapat memastikan kelancaran pendistribusianya, selain itu juga memberikan kemudahan akses keuangan kepada pelaku usaha, serta mengembangkan sistem sapi-sawit menjadi solusi atas permasalahan kekurangan produksi daging sapi tersebut. Bahan kebutuhan pokok merupakan komoditas penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, rawan bergejolak serta penyumbang yang dominan terhadap inflasi dalam perekonomian Indonesia kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari adanya ketersediaan dan terjangkaunya harga-harga komoditi bahan kebutuhan pokok. Mengingat begitu pentingnya komoditi tersebut, maka perlu dilakukan pemantauan harga yang merupakan indikator penting dalam menggambarkan cukup tidaknya ketersediaan komoditi tersebut. Maka kegiatan pemantauan komoditi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para pegambil keputusan dalam menetapkan kebijakan tata niaga dalam rangka menjaga stabilitas harga dan penurunan disparitas harga komoditi bahan kebutuhan pokok secara berkelanjutan.

Kestabilan harga komoditi bahan kebutuhan pokok diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang nyata bagi stabilitas inflasi dan perekonomian khususnya Kalimantan Tengah. Pendataan harga bahan pokok ini dimaksudkan untuk menyajikan berbagai data harga bahan pangan pokok secara terpadu , sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna memperoleh data secara lengkap untuk



kepentingan analisa, perencanaan dan penyusunan kebijakan harga barang pokok di suatu daerah, khususnya Kalimantan Tengah.

Pada sasaran 4 ini, Dinas Perdagind. Prov. Kalteng bekerja sama dengan para pelaku usaha guna memperoleh data setiap harinya terkait dengan informasi mengenai harga dan ketersediaan barang pokok dan strategis yang ada di pasaran. Juga pihak pelaku usaha diminta dalam menyesuaikan harga bahan pangan pokok secara bertahap, wajar dan didasari oleh fakta supply dan demand untuk masing-masing komoditi. Tujuannya agar tidak terjadi lonjakan harga yang meresahkan masyarakat.

Secara umum, harga barang kebutuhan pokok selama tahun berjalan relatif stabil, hanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga secara signifikan. Contohnya untuk komoditas daging, baik daging sapi dan ayam mengalami kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan, dikarenakan adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat. Demikian juga halnya dengan komoditas cabe merah / rawit dan komoditas bawang merah dan putih yang mengalami kenaikan harga yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan selain karena permintaan masyarakat yang tinggi juga disebabkan karena kurangnya ketersediaan komoditas tersebut di pasaran, yang bisa terjadi karena komoditas tersebut mengalami gagal panen.

Untuk lebih jelasnya, daftar harga bahan pokok selama bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel. 3.39 HARGA RATA-RATA BAHAN POKOK PANGAN TAHUN 2017

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun 2017												Rata - Rata
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Beras Karang Dukuh	kg	16.000	16.000	16.000	16.000	15.625	15.500	14.650	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.981
2	Gula Pasir	kg	13.050	13.000	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.950	12.950	12.950	12.950	12.971
3	Minyak Goreng Bimoli	btl	15.000	15.250	15.200	15.500	15.200	15.500	15.500	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.421
	Minyak grg tanpa merk	btl	9.500	9.500	9.500	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	10.542
4	Tepung Terigu	kg	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500	10.000	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.225
5	Daging Sapi murni	kg	127.500	125.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.750	123.800	123.800	123.800	123.800	123.579
6	Daging Ayam boiler	kg	38.800	28.500	29.500	32.300	32.600	31.600	33.100	35.800	27.900	27.900	27.900	27.900	31.150
7	Daging Ayam kampung	kg	67.500	66.200	65.000	62.500	62.500	62.500	64.100	62.800	63.500	63.500	63.500	63.500	63.925
8	- Telur ayam boiler	btr	1.600	1.500	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.550
	- Telur ayam kampung	btr	2.200	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.992
	- Telur itik	btr	2.700	2.500	2.500	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.488
9	Cabe Merah besar	kg	61.700	66.300	63.500	53.400	45.400	45.300	48.300	45.800	40.500	40.500	40.500	40.500	49.308
	Cabe Rawit / tiung	kg	91.200	116.400	130.500	84.800	55.200	50.000	52.500	48.300	38.500	38.500	38.500	38.500	65.242
10	Bawang merah	kg	43.600	35.500	39.700	36.300	30.400	34.100	40.500	30.600	25.200	25.200	25.200	25.200	32.625
11	Bawang putih	kg	28.500	38.500	40.000	40.500	50.000	44.200	33.100	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500	33.900
12	Susu														-
	- Merk Bendera (Putih)	390gr/kl	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.108
	- Bubuk merk Bendera	400gr/kl	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	Garam beryodium	250 gr	6.000	6.100	6.500	6.500	6.850	7.200	8.600	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500	10.413
14	Kacang kedelai	kg	13.000	13.000	13.000	13.000	12.800	13.000	13.400	13.625	14.000	14.000	14.000	14.000	13.402
15	Kacang Hijau	kg	22.000	21.800	21.600	20.000	22.000	22.500	23.500	22.750	21.200	21.200	21.200	21.200	21.746
16	Kacang tanah kulit	kg	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.600	26.900	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.125
17	Mie Instan	kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Ikan Asin Teri	kg	77.500	78.500	80.000	82.500	81.100	76.500	65.500	69.800	71.200	71.200	71.200	71.200	74.683
19	Ketela pohon	kg	3.000	3.500	3.200	3.750	3.750	3.750	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.504
20	Jagung pipilan kering	kg	6.000	6.200	6.000	6.200	6.000	6.000	6.100	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200	6.129



**Tabel 3.40 PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2009 – 2017**

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	HARGA RATA-RATA PERTAHUN								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beras Karang Dukuh	kg	7.500	9.000	14.500	12.500	12.250	13.500	15.800	15.400	14.981
2	Gula Pasir	kg	8.500	10.300	10.800	12.100	12.400	10.800	12.000	14.100	12.971
3	Minyak Goreng Bimoli	btl	12.800	12.100	13.500	13.500	13.300	14.700	15.500	15.000	15.421
	Minyak grg tanpa merk	btl	7.400	9.600	9.500	9.800	9.000	9.500	9.500	9.500	10.542
4	Tepung Terigu	kg	8.000	7.800	8.000	8.500	9.500	9.500	9.300	9.600	10.225
5	Daging Sapi murni	kg	75.000	80.250	80.000	92.500	110.000	124.000	121.000	126.000	123.579
6	Daging Ayam boiler	kg	24.200	25.900	25.500	27.500	29.000	28.000	31.500	31.000	31.150
7	Daging Ayam kampung	kg	43.000	50.600	50.650	57.000	60.000	63.000	63.500	65.200	63.925
8	- Telur ayam boiler	btr	1.000	1.100	1.100	1.200	1.250	1.400	1.500	1.500	1.550
	- Telur ayam kampung	btr	1.300	1.600	1.400	1.300	1.450	1.800	1.800	2.000	1.992
	- Telur itik	btr	1.600	1.800	1.600	1.800	2.100	2.500	2.400	2.400	2.488
9	Cabe Merah besar	kg	21.500	18.500	38.500	18.500	21.000	39.000	51.000	48.700	49.308
	Cabe Rawit / tiung	kg	22.000	20.500	66.000	26.700	36.000	45.500	38.500	48.700	65.242
10	Bawang merah	kg	14.000	16.700	22.500	14.500	35.000	20.500	26.000	41.300	32.625
11	Bawang putih	kg	10.700	21.000	22.500	15.300	21.500	16.000	20.250	36.500	33.900
12	Susu									-	-
	- Merk Bendera (Putih)	390gr/kl	8.000	8.000	7.500	8.000	8.500	9.500	10.000	10.000	10.108
	- Bubuk merk Bendera	400gr/kl	25.500	26.200	28.000	30.000	34.000	35.250	43.500	45.000	45.000
13	Garam beryodium	250 gr	750	750	975	6.000	6.000	8.500	8.200	7.600	10.413
14	Kacang kedelai	kg	9.700	10.000	10.500	-	-	10.750	12.000	11.000	13.402
15	Kacang Hijau	kg	11.700	13.500	16.000	13.700	14.500	19.000	22.500	22.000	21.746
16	Kacang tanah kulit	kg	14.200	15.500	14.500	15.500	20.000	21.500	25.625	26.500	26.125
17	Mie Instan	kg	1.250	1.400	1.500	1.500	1.700	1.900	2.000	2.000	2.500
18	Ikan Asin Teri	kg	-	-	-	-	73.000	71.250	72.500	9.300	74.683
19	Ketela pohon	kg	1.700	-	-	-	5.000	4.700	3.000	3.000	3.504
20	Jagung pipilan kering	kg	3.500	6.400	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.129



Untuk mendukung pencapaian 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis Keempat, yaitu Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun satu buah program yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, adapun rincian programnya adalah sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu:

- Pasar murah menjelang hari besar keagamaan
- Koordinasi pendistribusian barang sembako dan barang strategis di Kalimantan Tengah
- Pasar Penyeimbang dalam rangka pengendalian inflasi daerah
- Pemeliharaan Pasar Penyeimbang
- Rakor identifikasi barang kebutuhan pokok menjelang puasa, lebaran dan Idul Adha

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 330.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.303.989.500,- atau sebesar 92,12 persen.

Untuk mencapai 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis ketiga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari kendala atau permasalahan yang dihadapi. Berikut permasalahan serta upaya pemecahan masalah untuk mencapai Sasaran 4 ini antara lain :

a) Permasalahan

- struktural di sektor ril yang menimbulkan keraguan. Tantangan pertama, yakni terbatasnya kapasitas produksi dalam negeri terutama produktivitas yang rendah dan luas lahan semakin menyusut.
- Permasalahan struktural terkait nilai tukar rupiah yang masih bergejolak tinggi. Hal ini berkaitan dengan ketergantungan pada ekspor berbasis sumber daya alam dan bahan baku.
- Produksi pangan yang rentan dalam pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi.
- Ketergantungan energi nasional pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
- Pasar yang tidak efisien. Hal itu tercermin dari tingkat distribusi yang panjang dan didominasi pelaku besar.



b) Upaya Pemecahan Masalah :

- Diperlukan kerja sama antar daerah dalam mengendalikan inflasi. Melalui implementasi pengembangan pusat harga nasional sehingga bisa diketahui harga yang tinggi dan penyesuaian dengan harga yang murah.
- Pembenahan produksi dalam daerah, untuk memenuhi tingkat kebutuhan, supaya jangan sampai terjadi kekurangan stok yang dapat memicu inflasi.
- Menghimbau masyarakat Kalimantan untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan menggunakan produk dalam negeri. .
- Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan.

3.2.5 SASARAN STRATEGI LIMA

SASARAN STRATEGI 5 :

Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Untuk dapat mencapai misi kelima, yaitu mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, serta dapat mencapai tujuan kelima, yaitu meningkatkan meningkatkan tertib perdagangan, maka ditetapkan sasaran strategis kelima yaitu meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Dalam sasaran strategis yang kelima ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan / formula tertentu, adapun akan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel. 3.41 SASARAN STRATEGIS 5
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2014 - 2017**

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2017	2014	2015	2016	2017		
8. Persentase Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yg beredar	100 %	100	100	100	100	100	Sangat Baik
9. Persentase Peningkatan Pengujian / Komoditi Produk Mutu Ekspor	10 %	14,28	0,72	6,32	14,34	143,40	Sangat Baik

Tabel 3.42. Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN (%)
5.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	8. Persentase Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yg beredar	100 %	100 %	100
		9. Persentase Peningkatan Pengujian / Komoditi Produk Mutu Ekspor	10	14,34	143,40



Tabel 3.43. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI	
				Thn 2016 (n-1)	Thn 2017 (n)
5.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Persentase Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yg beredar	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Peningkatan Pengujian / Komoditi Produk Mutu Ekspor	10 %	6,32 %	14,34 %

Tabel 3.44. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN
5.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	8. Persentase Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yg beredar	100 %	100 %	100 %
		9. Persentase Peningkatan Pengujian / Komoditi Produk Mutu Ekspor	10,50 %	14,34 %	136,57 %

Tabel 3.45 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
5.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	8. Persentase Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yg beredar	100%	100	100	1.422.842.000	1.130.713.100	79,47
		9. Persentase Peningkatan Pengujian / Komoditi Produk Mutu Ekspor	10 %	20,40	204,05			

Analisa atas capaian indikator sasaran empat adalah sebagai berikut :

3.2.5.1 Persentase Pengaduan Konsumen Terkait Barang dan Jasa yang Beredar

Persentase pengaduan konsumen terkait barang dan jasa yang beredar pada tahun 2017 tercatat sebesar 100 persen telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 persen, sebagaimana pada sasaran strategis lima, indikator kinerja kedelapan, sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen

Tugas dan tanggungjawab terhadap perlindungan konsumen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus dilakukan secara menyeluruh oleh stakeholdernya yaitu pemerintah, dunia usaha dan



masyarakat. Stakeholder ini sebagai tiga pilar utama yang saling menopang dalam tugas pemberdayaan konsumen.

Pilar pertama adalah pemerintah, yang dengan kerangka kebijakan dan strategis regulasi, mengawasi dan mengatur senganap aspek distribusi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pilar kedua adalah para pelaku usaha yang menyerahkan barang dan jasa melalui transaksi langsung kepada masyarakat dengan menerapkan norma dan standar yang telah ditentukan. Dan, pilar ketiga adalah masyarakat selaku konsumen akhir yang melalui proses transaksi yang wajar dan jujur mendapatkan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang dibeli atau dikonsumsi.

Dalam perekonomian yang semakin berkembang saat ini, interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan masyarakat tidak jarang menimbulkan perselisihan yang memerlukan penanganan secara efektif dan efisien. Karena itulah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) perlu dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin timbul karena terjadinya ketidakpuasan sebagai akibat dari transaksi antara pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen .

Tugas BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

BPSK di Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 telah dibentuk di 5 wilayah yaitu di Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas dan Kota Palangka Raya. Untuk Kota Palangka Raya pengaduan



konsumen yang masuk ke BPSK Kota P.Raya sampai dengan Triwulan IV 2017 adalah sebanyak 25 pengaduan dan yang telah mendapat putusan sebanyak 25 pengaduan. Untuk BPSK Kabupaten Muara Teweh, pengaduan yang masuk sebanyak 6 pengaduan dan telah diselesaikan secara mandiri sebanyak 6 pengaduan. Untuk total keseluruhan pengaduan yang masuk sebanyak 31 pengaduan, telah ditangani sebanyak 31 pengaduan atau sebesar 100 %.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen produk pangan akan hak-haknya, Disperindag. Prov Kalteng telah melakukan upaya pembinaan melalui penyuluhan, publikasi hasil pengawasan dan survey produk pangan dan pengaduan konsumen.

Penyuluhan konsumen dan pelaku usaha dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai apa saja hak-hak konsumen dan adanya kepedulian konsumen terhadap informasi pada produk pangan (pencantuman tanggal kadaluwarsa, tanggal produksi, komposisi, dan lain-lain) ketika menentukan produk pangan yang dipilih tujuan dari kegiatan tersebut tercapai serta memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang telah memperoleh akses informasi mengenai hak-hak konsumen produk pangan sehingga masyarakat akan mampu menjadi konsumen yang mandiri.

Selain itu pengawasan produk terhadap barang dan jasa juga sangat diperlukan, bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penyebaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Obyek pengawasan barang dan jasa antara lain :

1. Daging mentah dan ikan, pengawasan meliputi panyajian yang bersih, cukup air, pengoplosan daging, daging mati kemarin (tiren), daging golongan, dan sebagainya.
2. Makanan jajanan/ makanan siap saji, yang diawasi yaitu penggunaan pewarna, pengawet, dan bahan-bahan berbahaya lainnya seperti formalin.
3. Makanan kemasan, pengawasan meliputi tanggal kadaluarsa makanan, kondisi kemasan (segel utuh atau tidak, kemasan utuh atau sobek, penyok) dan lain sebagainya.

Pengawasan barang dan jasa dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan menguji produk makanan yang ada apakah aman dikonsumsi. Apabila ditemukan makanan dengan kandungan bahan berbahaya, maka pihak yang berwenang akan memberikan peringatan dan pembinaan lanjutan dengan tujuan memberikan informasi bahwa jenis makanan atau produk yang memiliki kandungan berbahaya jangan dijual lagi kerana berbahaya bagi kesehatan.



Dengan ditingkatkannya pengawasan maka akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Yakni memberikan kepastian mutu dan jaminan atas produk yang dikonsumsi sehingga tercipta perlindungan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat serta memastikan implementasi standar maupun ketentuan lain dalam memenuhi spesifikasi minimum yang berdampak pada pengembangan daya saing di dunia usaha

Tabel 3.46
Hasil Kegiatan Pengawasan dan Penyuluhan Konsumen Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Output / Hasil		
		frekueunsi	Orang/ Toko / Pedagang	Temuan
1.	Penyuluhan Konsumen	2	40 orang	-
2.	Tim Terpadu minuman beralkohol	2	8 Toko	-
3.	Tim Terpadu khusus pangan	3	17 Toko	57
4.	Pengujian dan pembelian sampel ikan	5	47 Toko	6
5.	Pengawasan peredaran barang & jasa	8	56 Toko	136
6.	Pengawasan peredaran cukai rokok	3	30 Toko	17
7.	Pengawasan bahan berbahaya	6	57 Toko	-
Jumlah		29	255	216

Dapat dilihat dari data tabel diatas, Kegiatan penyuluhan konsumen selama tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan total peserta sebanyak 40 orang. Dan dari 6 kegiatan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2017 dengan total frekuensi kegiatan sebanyak 27 kali, dari 215 buah toko/ pedagang yang diawasi di 14 Kab / Kota di Kalteng terdapat 216 buah temuan , dalam kondisi rusak, mengandung bahan berbahaya, kadaluarsa, maupun yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

Apabila dalam kegiatan pengawasan tersebut ditemukan barang yang tidak lolos atau tidak sesuai SNI, maka secara otomatis akan ditarik langsung dan untuk barang pangan dilakukan pengecekan (Lab. BPOM) dan pemusnahan di tempat. Dihimbau kepada masyarakat agar lebih cermat dan cerdas setiap membeli barang di pasaran. Terutama barang pangan harus dilihat masa kadaluarsanya.

**3.2.5.2 Persentase Peningkatan Pengujian Komoditi/ Produk Mutu Ekspor**

Persentase peningkatan pengujian komoditi / produk mutu ekspor pada tahun 2017 tercatat sebesar 14,34 persen telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 10 persen, sebagaimana pada sasaran strategis lima, indikator kinerja kesembilan, sehingga persentase capaiannya sebesar 143,40 persen

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom pengelolaan laboratorium diserahkan kepada Pemerintah Propinsi meliputi :

1. Verifikasi standar dan kalibrasi untuk ukuran satuan ukuran
2. Pengambilan contoh
3. Pengujian dan sertifikasi mutu barang
4. Pengawasan, penyuluhan dan pembinaan terhadap Produsen Eksportir, Eksportir dan Calon Eksportir,
5. Penyuluhan dibidang Perlindungan Konsumen

BPSMB Palangka Raya dibentuk untuk meningkatkan pelayanan jasa teknis pengujian dan pengawasan mutu kepada masyarakat pengguna jasa/dunia usaha dalam rangka penentuan mutu produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dimana mutu merupakan salah satu persyaratan dalam transaksi perdagangan baik nasional dan internasional. Adapun Kinerja BPSMB Palangka selama tahun 2010 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

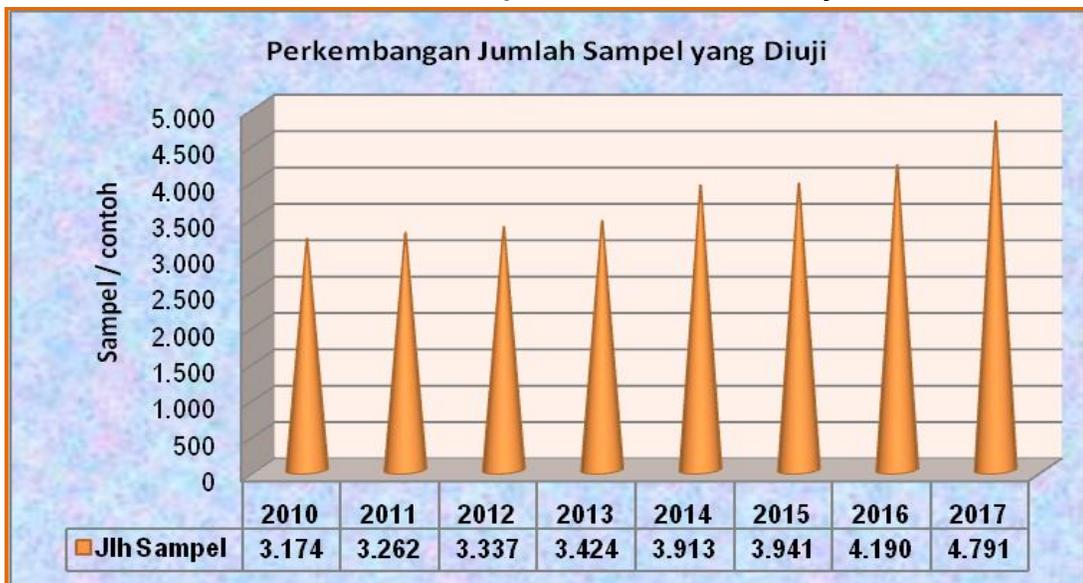
Tabel 3.47
Kinerja UPTD BPSMB Palangka Raya Tahun 2010 s/d 2017

Tahun	PAD (Rp)	LHA	Jumlah Sampel /Contoh	Peningkatan Jumlah Sampel
2010	51.700.000	65	3.174	5,80
2011	61.290.000	71	3.262	2,77
2012	71.500.000	73	3.337	2,30
2013	86.270.000	80	3.424	2,61
2014	99.500.000	86	3.913	14,28
2015	82.145.000	82	3.941	0,72
2016	141.845.000	90	4.190	6,32
2017	187.575.740	140	4.791	14,34

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah sampel / komoditi yang telah di uji mutunya pada tahun 2017 berjumlah 4.791 sampel, atau meningkat 14,34 persen dari tahun 2016 sebanyak 4.190 buah sampel uji. Jumlah sample yang diuji mutu SIR berasal dari 4 (empat) perusahaan karet : PT. Bumi Asri Pasaman (BAP) Kab. Barsel (2.320 Sampel), PT. Karya Sejati Kapuas (679 Sampel), PT.SAMPIT (570 Sampel)

dan PT. Borneo Makmur Lestari Palangka Raya (1.222), dan pengujian komoditi Crude Palm Oil (CPO) berasal dari perusahaan PT. KIU, PT. Graha Inti, PT.KSK dan PT. Indriani. Contoh/sampel komoditi yang telah diuji menunjukkan bahwa dari uji laboratorium terhadap parameter produk yang bersangkutan, telah memenuhi standar yang telah dipersyaratkan SNI, sehingga mutu produk layak untuk diekspor.

Gambar 3.17 Grafik Perkembangan Jumlah Sampel Tahun 2010 s.d 2017 pada UPTD. BPSMB P. Raya

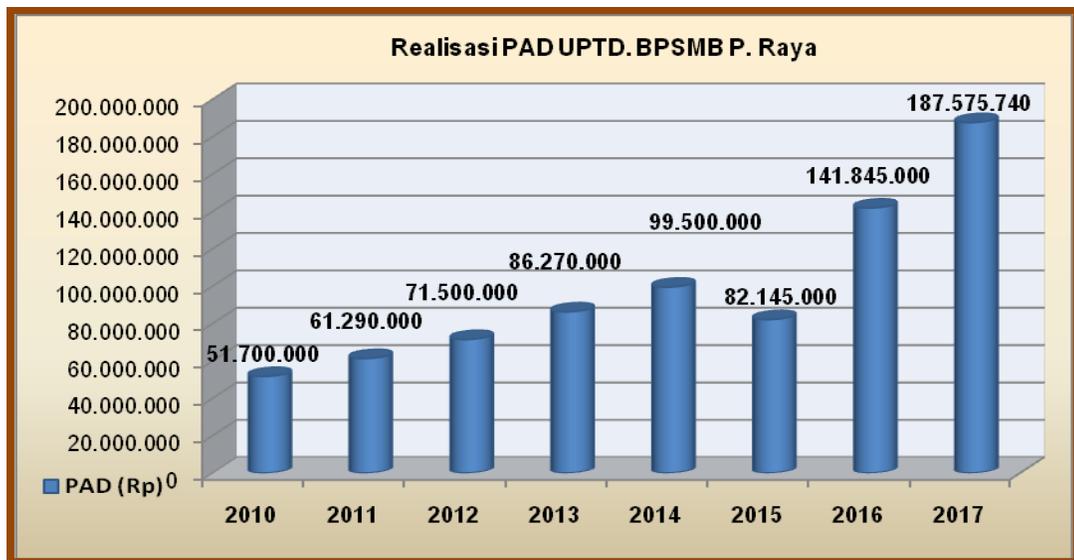


Gambar 3.18 Proses Pengujian Mutu Barang pada UPTD. BPSMB P. Raya



Kinerja UPTD. BPSMB Palangka Raya dapat dilihat juga dari segi pendapatan. Realisasi PAD pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 187.575.740,00 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp. 110.000,000,- atau mencapai 170,52 persen. Bila dilihat dari realisasi Tahun 2016 yaitu Rp. 141.845.000,- maka peningkatan realisasi PAD pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 45.730.740,- atau meningkat 32,24 persen. Demikian juga dengan Jumlah penerbitan LHA (Laporan Hasil Analisa) tahun 2017 sebanyak 140 LHA, atau naik sebesar 55,55 % dari tahun 2016 sebanyak 90 lembar.

Gambar 3.19 Realisasi PAD pada UPTD. BPSMB P. Raya Tahun 2010 s.d 2017



Gambar 3.20 Peralatan Laboratorium pada UPTD. BPSMB P. Raya



Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis Kelima, yaitu Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun 2 (dua) buah program yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, adapun rincian programnya adalah sebagai berikut :

1. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.**

Program ini didukung oleh 15 (lima belas) kegiatan, yang meliputi kegiatan Penyuluhan Konsumen, Pengawasan Barang yang beredar di masyarakat (pangan: ikan, minuman beralkohol; dan cukai rokok), kegiatan Sosialisasi



Pengawasan Perlindungan Konsumen, Sosialisasi BPSK, Sosialisasi Pencantuman Klausula Baku bagi pelaku usaha serta Bimtek Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 1.230.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.987.897.056,- atau sebesar 80,32 persen.

2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini didukung oleh 15 (lima belas) kegiatan, meliputi kegiatan yang terkait dengan pelayanan jasa teknis pengujian dan pengawasan mutu kepada masyarakat pengguna jasa/dunia usaha dalam rangka penentuan mutu produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh UPTD. BPSMB Palangka Raya, khususnya pengujian mutu produk yang akan diekspor. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 1.422.842.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.130.713.100,- atau sebesar 79,47 persen.

Untuk mencapai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis kelima, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari kendala atau permasalahan yang dihadapi. Berikut permasalahan serta upaya pemecahan masalah untuk mencapai Sasaran 5 ini antara lain :

a) Permasalahan

- Kurangnya informasi masyarakat terhadap keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen melalui tugas dan kewenangannya
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
- Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporkan
- Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.
- Banyak konsumen yang belum waspada dan menyadari pentingnya memperhatikan Label yang tertera pada produk khususnya mas berlaku kadaluarsa produk.
- Masih banyaknya komoditi lokal maupun impor yang tidak sesuai dengan SNI.
- Banyaknya barang tiruan/ palsu yang beredar di Pasar



- Tidak adanya payung hukum misalnya berupa Peraturan Daerah tentang pengujian mutu barang di Kalimantan Tengah yang sifatnya wajib, karena saat ini pelanggan menguji mutu produk secara sukarela.
- Kurang dikenalnya BPSMB P. Raya di kalangan pelaku usaha di Kalimantan Tengah.
- Masih terbatasnya ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki

b) Upaya Pemecahan Masalah :

- Mengadakan Sosialisasi tentang Keberadaan dan fungsi BPSK di Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPK, untuk lebih mendorong masyarakat menyerahkan penyelesaian sengketa melalui BPSK
- Mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap BPSK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK untuk penegakan hukum konsumen
- Tetap melakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, lembaga/institusi pemerintah, swasta dan lain-lain.
- Sosialisasi terhadap standarisasi harus terus dilakukan sampai muncul kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukuran dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa
- Memberikan informasi sekaligus memberikan pemahaman payung hukum tersebut secara kontinyu dan konsisten tentunya akan memberikan kesadaran kepada produsen bahwa dalam menjalankan usaha harus melindungi kepentingan konsumen dengan cara mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat dan cerdas setiap membeli barang di pasaran. Terutama barang pangan harus dilihat masa kadaluarsanya.
- Mengadakan Sosialisasi keberadaan dan peranan BPSMB dalam membina mutu produk ekspor di Kalimantan Tengah melalui media elektronik dan media cetak.
- Mengusahakan adanya payung hukum berupa Surat Keputusan Gubernur atau Peraturan Daerah tentang pengujian mutu barang.

**3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN****3.3.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2017**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar Rp. 126.500.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah), Realisasinya sebesar Rp. 190.9583140,- (Seratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan tiga ribu seratus empat puluh rupiah) atau sebesar. Adapun rincian PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 3.45 dibawah ini :

**Tabel 3.48 Realisasi PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Prov. Kalteng Tahun 2017**

No	Uraian	Target PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp)	% Realisasi	Keterangan
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan tanah dan Bangunan	16.500.000,-	3.382.400,-	20,49	Sewa Rumah Dinas - Sekretariat
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	110.000.000,-	187.575.740,-	170,52	Jasa Pengujian Lab. UPTD. BPSMB P. Raya
JUMLAH		126.500.000,-	190.958.140,-	150,95	

3.3.2 REALISASI APBD TAHUN 2017

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 25.070.635.674,-Realisasinya sebesar Rp. 22.003.790.081,- (92,53%), dengan rincian sbb :

- **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 12.705.377.274,- terealisasi sebesar Rp. 10.903.842.819,- (85,82%) Sisanya sebesar Rp. 1.801.534.455,- (14,18%);
- **Belanja Langsung** sebesar Rp. 12.365.258.400,- terealisasi sebesar Rp. 11.099.947.262,- (89,77%) Sisanya sebesar Rp. 1.265.311.138,- (10,23%), dengan rincian sbb:
 - **Belanja Pegawai** Pagu sebesar Rp. 14.644.415.474,- Realisasi sebesar Rp. 12.755.524.919,- (87,10%) Sisanya sebesar Rp. 1.888.890.555,- (12,89%)
 - **Belanja Barang dan Jasa**, Pagu sebesar Rp. 8.434.720.200,- Realisasi sebesar Rp. 7.372.443.811,- (87,40%) Sisanya sebesar Rp. 1.062.276.388,12,- (12,59%).



- **Belanja Modal**, Pagu sebesar Rp. 1.991.500.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.875.821.350,- (94,19%) Sisanya sebesar Rp. 115.678.650,- (5,81%), Realisasi Per Program, sebagai berikut :

Tabel 3.49 Realisasi Anggaran APBD Per Program 2017

	PROGRAM	Anggaran (Rp. Juta)	Realisasi		Sisa	
			(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%
Perdagangan	1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.167.500.000	1.868.659.406	86,21	298.840.594	13,79
	2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1.820.342.000	1.501.122.760	82,46	319.219.240	95,45
	3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	700.000.000	680.722.500	97,25	19.277.500	2,75
Industri	4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.478.520.000	2.132.217.119	86,03	346.302.881	13,97
	5. Penumbuhan Industri Agro	460.000.000	414.312.100	90,07	45.687.900	9,93
Penunjang	6. Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.724.988.400	2.627.886.336	96,44	97.102.064	3,56
	7. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.700.500.000	1.577.003.541	92,74	101.852.009	7,26
	8. Peningkatan Disiplin Aparatur	100.200.000	96.750.000	96,56	3.450.000	3,44
	9. Aparatur					
	10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	14.347.500	71,74	5.652.500	28,26
	11. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	148.208.000	144.752.000	97,67	3.456.000	2,33
	12. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset daerah	45.000.000	42.174.000	93,72	2.826.000	6,28
	BELANJA LANGSUNG	12.365.258.400	11.099.947.262	89,77	1.243.666.688	10,23
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.705.377.274	10.903.842.819	85,82	1.801.534.455	14,18
	TOTAL BELANJA	25.070.635.674	22.003.790.081	87,77	3.066.845.593	12,23

**3.3.3 REALISASI APBN TAHUN 2017**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran dekonsentrasi APBN dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dengan total sebesar Rp. 4.138.987.000,- Realisasinya sebesar Rp. 3.599.929.875,- (86,98%), dengan rincian sbb :

Tabel 3. 50
Realisasi APBN Tahun 2017

No.	SUMBER/ PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp. Juta)	Realisasi		Sisa	
			(Rp. Juta)	%	(Rp. Juta)	%
I.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI	1.180.000.000	1.173.935.000	99,49	6.065.000	0,51
1.	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.180.000.000	1.173.935.000	99,49	6.065.000	0,51
	Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah	1.180.000.000	1.173.935.000	99,49	6.065.000	0,51
II.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI	2.958.987.000	2.425.994.875	81,98	532.992.125	18,02
1.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	2.059.167.000	1.534.687.925	74,53	524.479.075	25,47
	Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	2.059.167.000	1.534.687.925	74,53	524.479.075	25,47
2.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	899.820.000	891.306.950	99,05	891.306.950	0,95
	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	899.820.000	891.306.950	99,05	891.306.950	0,95
	TOTAL BELANJA	4.138.987.000	3.599.929.875	86,98	539.057.125	13,02



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Disdagperin menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Sangat disadari masih diperlukan perbaikan pada berbagai bidang untuk dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi selama satu tahun.

4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Pencapaian kinerja sektor perdagangan dan industri menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor perdagangan dan industri sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

- ✓ Pertumbuhan sektor industri pengolahan;
- ✓ Pertumbuhan sub sektor perdagangan;

Disamping permasalahan tersebut sektor industri pengolahan Kalimantan Tengah masih menghadapi masalah klasik seperti :

- ✓ Ketergantungan pada bahan baku impor;
- ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana serta Penguasaan teknologi Industri serta minimnya akses permodalan, perijinan, pemasaran;
- ✓ Penerapan standarisasi produk, HKI dan sistem mutu masih kurang



- ✓ Infrastruktur belum memadai, Kenaikan Upah Buruh (UMK), kenaikan TDL, ketidakpastian pasokan energi;
- ✓ Beban biaya bahan baku menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan.

Sedangkan persoalan yang terkait dengan perdagangan antara lain seperti :

- ✓ Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah.
- ✓ Masih rendahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan lebih disebabkan oleh defisit migas dan jasa yang semakin membesar.
- ✓ Belum stabilnya harga produk dikarenakan panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.
- ✓ Perdagangan bebas mengakibatkan membanjirnya barang-barang impor yang masuk dan produk dumping ke Indonesia khususnya Kalimantan Tengah;
- ✓ Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian produk impor serta safe guard yang jarang digunakan;
- ✓ Pola pikir konsumen yang lebih cenderung ke produk impor;
- ✓ Masih kurangnya diversifikasi tujuan ekspor;
- ✓ Kurangnya Ketersediaan akses data produk dan negara tujuan ekspor;

4.3 SARAN

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

- 1) Pemetaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Kalimantan Tengah sebagai alternatif pengganti barang-barang impor (substitusi impor).
- 2) Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mencegah defisit neraca perdagangan serta bersinergi dgn *stakeholders* dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan.

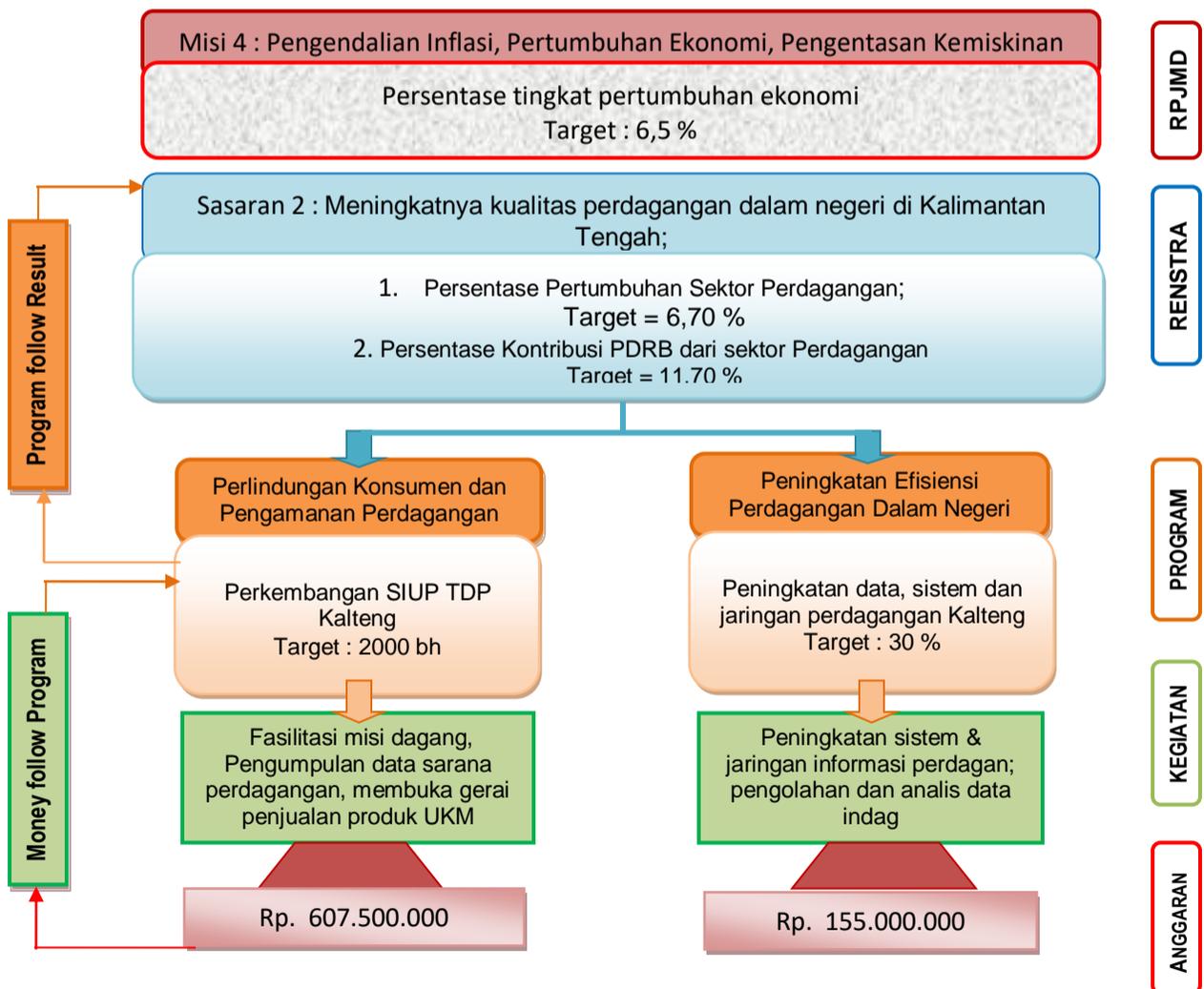


- 4) Penyusunan perencanaan dan estimasi serta penggunaan anggaran sehingga diharapkan dengan menggunakan skala prioritas agar kegiatan benar-benar dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat.
- 5) Dalam penyusunan program perlu adanya koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan karena koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya
- 6) Koordinasi dan konsultasi teknis industri dan perdagangan baik Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat merupakan penyatuan persepsi, sinergitas program yang dapat mendorong pembangunan sektor industri dan perdagangan

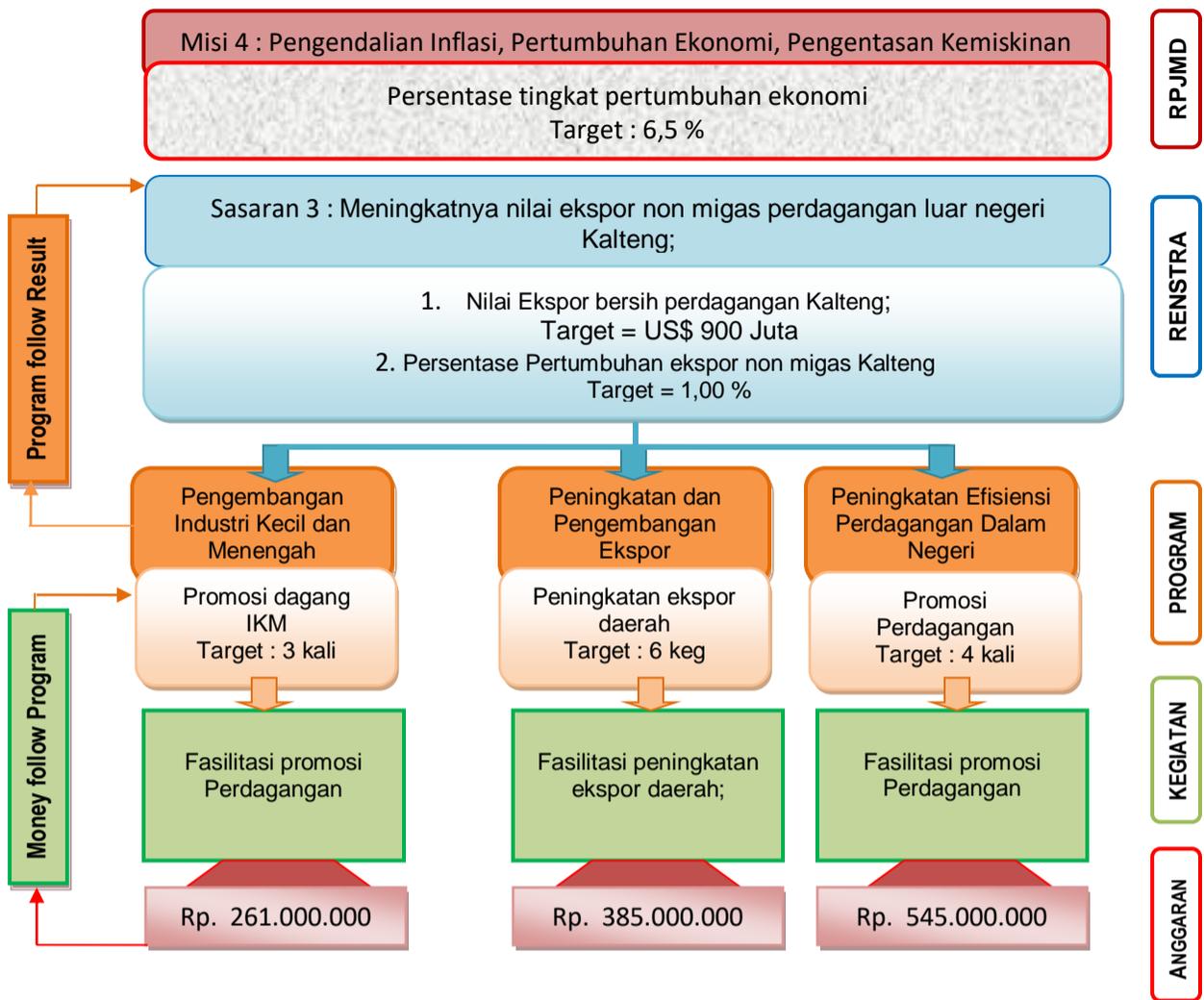
CASCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



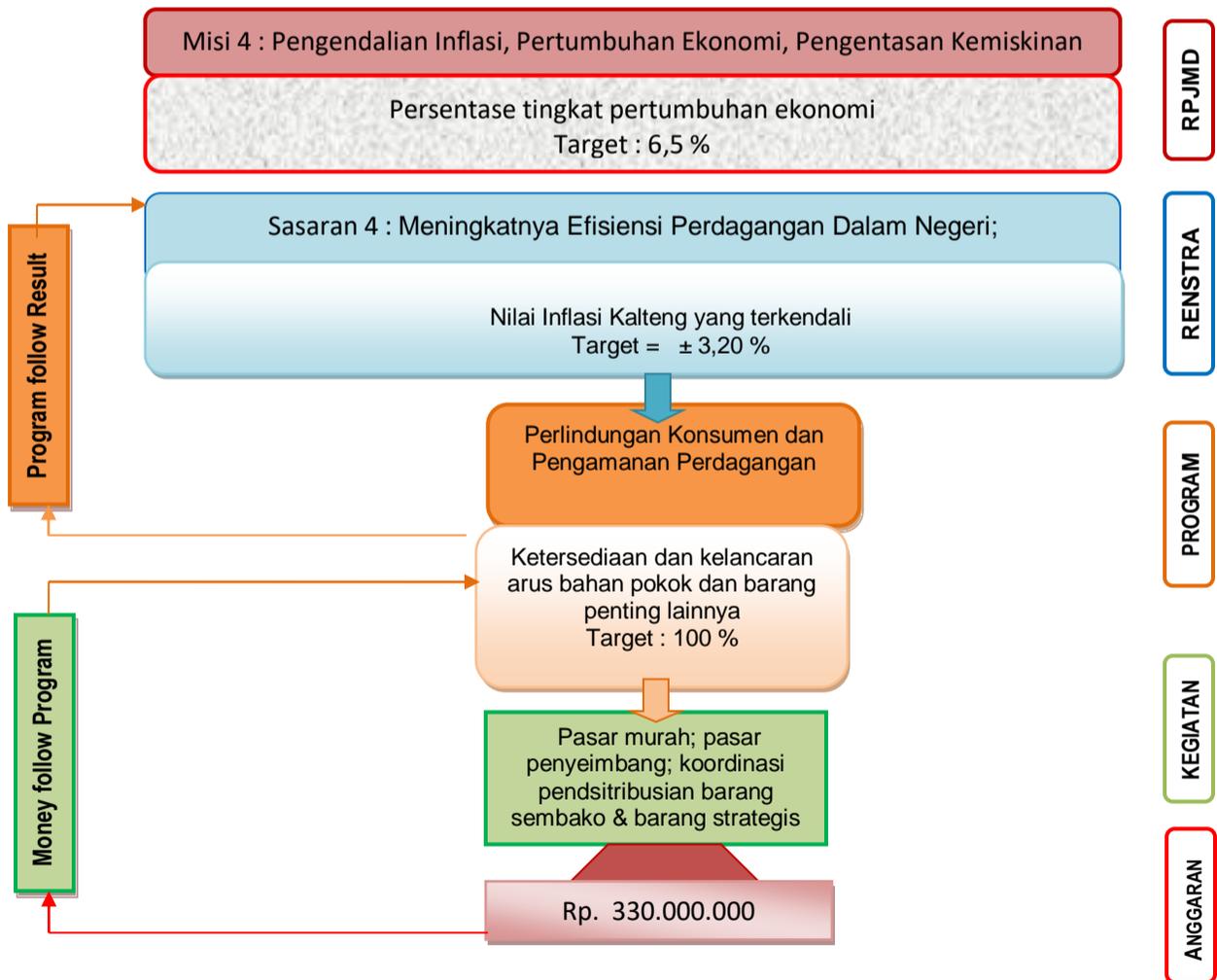
CASCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



CASCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



CASCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



CASCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

